

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian tahap analisis yang penulis lakukan, Penulis akhirnya berhasil menemukan hubungan antara masing-masing tahapan analisis. Melalui hasil analisis yang telah penulis lakukan dengan menggunakan perangkat *framing* Pan dan Kosicki serta konsepsi teori dari Dietram Scheufele, penulis menemukan *frame* yang digunakan tempo untuk membingkai wacana tentang partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Frame Kompas mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu 2004 adalah *Kompas* membuat penonjolan tentang masih adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam partisipasi mereka dalam dunia politik, tetapi diskriminasi tersebut dianggap *Kompas* bukan sepenuhnya disebabkan oleh peraturan pemerintah tetapi juga karena proses sejarah dan perilaku etnis Tionghoa itu sendiri. Etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas di Indonesia dianggap *Kompas* masih mengalami diskriminasi dalam partisipasi mereka di dunia politik. Contoh untuk memperkuat kesimpulan yang penulis rumuskan tersebut adalah pada berita "*Keturunan Tionghoa Belum Tercatat Sebagai Pemilih*". Pada paragraf pertama artikel tersebut, *Kompas* menuliskan sebagai berikut ini:

Diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa terbukti belum juga hilang walaupun semua pejabat sudah gembar-gembor tentang persamaan hak. Warga keturunan Tionghoa malah kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004 karena mereka belum tercatat sebagai calon pemilih. Alasannya, banyak yang tidak memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sehingga mereka sulit mendapatkan surat lain, termasuk KTP yang menjadi syarat pencatatan pemilih. (*Kompas*, 12 November 2004)

Kalimat pertama pada paragraf tersebut kemudian penulis artikan bahwa *Kompas* melihat bahwa masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa walaupun para pejabat sudah menggembar-gemborkan tentang persamaan hak, Hal tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan Tri Agung Kristanto berikut ini.

Diskriminasi ke etnis Tionghoa, harus diakui sampai saat ini di Indonesia masih terjadi karena proses sejarah, kalau kita belsajar sejarah dulu tentang bagaimana pemerintahan Belanda memperlakukan etnis Tionghoa berbeda dengan keturunan lainnya, kan proses-proses ke diskriminasi. (Tri Agung Kristanto, Kepala Desk Politik dan Hukum Kompas. Wawancara tanggal 9 Maret 2010)

Tetapi beliau juga menambahkan bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia terjadi lebih karena proses sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Dimana hal tersebut juga tertuang dalam artikel *Kompas* yang berjudul “*TKI dan Warga Tionghoa Terancam Tak Ikut Pemilu*”, dimana terdapat paragraf yang menyebutkan, sejarah adanya peraturan SBKRI bagi etnis Tionghoa, yang ditulis sebagai berikut:

Akan tetapi, karena golongan Tionghoa sejak zaman kolonial Belanda dimasukkan dalam golongan Timur Asing seperti di atur *staatblad* Hindia Belanda, maka warga keturunan

Tionghoa itu tidak dianggap sebagai WNI. Perlakuan itu tetap berlangsung meski penjajahan berakhir dan Indonesia sudah merdeka. (*Kompas*, 2 Februari 2004)

Selain karena proses sejarah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di anggap *Kompas* juga terjadi karena perilaku beberapa etnis Tionghoa yang melakukan korupsi dan merugikan negara Indonesia. Hal tersebut muncul pada temuan di level analisis konteks melalui wawancara dengan Tri Agung Kristanto yang menyebutkan bahwa memang harus diakui masih ada persoalan mengenai diskriminasi misalnya terkait dengan SKBRI, secara aturan kan mestinya sudah tidak ada lagi. Saya kira mestinya sudah tidak ada diskriminasi, meskipun juga beberapa hal kritik-kritik terhadap etnis tionghoa yang mereka sendirilah masih menempatkan diri sebagai warga asing. Kenapa saya mengatakan begitu, karena dalam banyak kasus terutama kasus korupsi banyak orang-orang Tionghoa yang kabur, itu yang menjadi persoalan bagaimana masyarakat yang lain melihat orang Tionghoa. Jadi dalam konteks seperti itu, kemudian mereka menjadi *alert*, menjadi curiga, sehingga memunculkan kasus-kasus diskriminasi pada yang lain.

Frame Kompas mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu 2009 adalah *Kompas* menonjolkan bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa sudah mulai aktif dan etnis Tionghoa sudah berani mengeluarkan pendapat dan memberikan dukungan terhadap calon presiden tertentu. Sebagai contoh untuk memperkuat temuan penulis tersebut terdapat pada artikel *Kompas* yang berjudul “*Pemilu Presiden: Sofjan Wanandi Kampanyekan JK-Win*”. Pada paragraf pertama artikel tersebut, dituliskan sebagai berikut:

Pengusaha nasional, Sofjan Wanandi, bersama sekitar 200 tokoh Tionghoa di Makasar, Sulawesi Selatan Jumat(15/5), mendeklarasikan dukungan terhadap capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto atau JK-Win. (*Kompas*, 16 Mei 2009)

Melalui kutipan artikel tersebut terlihat bahwa etnis Tionghoa sudah berani memberikan partisipasi politiknya dengan mendukung dan mengikuti kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden saat itu yaitu Jusuf Kalla-Wiranto. Hal tersebut diperkuat melalui temuan pada analisis konteks melalui wawancara dengan Tri Agung Kristanto yang menyebutkan etnis Tionghoa pada Pemilu tahun 2009 secara partisipasi semakin besar, dan semakin terbuka juga. Semakin banyak caleg-caleg dari etnis Tionghoa, bahkan dalam pemerintahan di eksekutif juga tidak sedikit sekarang etnis Tionghoa yang menjadi bupati, walikota atau gubernur.

Disini kemudian terdapat perbedaan *frame* yang digunakan *Kompas* dalam membingkai wacana partisipasi politik etnis Tionghoa pada Pemilu tahun 2004 dengan Pemilu 2009 dan berita *Kompas* mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa pada tahun 2009 sudah sangat berkurang. Hal ini terjadi karena pada Pemilu 2004, adalah Pemilu pertama etnis Tionghoa sudah tidak lagi terkekang berbagai peraturan seperti pada zaman Orde Baru, sehingga isu-isu tentang diskriminasi etnis Tionghoa masih sering terlihat dan masih hangat dibicarakan. Sedangkan pada Pemilu 2009, etnis Tionghoa sudah banyak lagi mengalami diskriminasi dan etnis Tionghoa dianggap sama dengan etnis lain di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan Tri Agung Kristanto berikut ini.

Mulai berkurang ya karena di tahun 2004 itu ada transisi proses tahun 1998 kebawah atau pada jaman Orde Baru, Chinese kan tidak begitu leluasa. Begitu Gus Dur naik kan menjadi lebih leluasa, paska pemerintahan Gus Dur ketika semua aspek-aspek itu dibuka terjadi pemilu di 2004 kan, jadi kelihatan bagaimana partisipasi mereka. Tahun 2009 saya kira “sudah normal”, kita tidak pernah lagi membicarakan suku-suku...(Tri Agung Kristanto, Kepala Desk Politik dan Hukum Kompas. Wawancara tanggal 9 Maret 2010)

Penulis juga mencoba mencari tahu latar belakang *frame Kompas* tersebut dimana walaupun *Kompas* pada didirikan oleh etnis Tionghoa yaitu PK Ojong dan pada awalnya banyak etnis Tionghoa yang menjadi wartawan *Kompas* tetapi mereka sudah berpikir tentang ke Indonesiaan, sehingga mereka menganggap semua etnis di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama termasuk etnis Tionghoa. Mereka tidak “melihat” etnis. Prinsip tersebut juga digunakan *Kompas* dalam memberitakan tentang partisipasi politik etnis Tionghoa, dimana *Kompas* bersikap jika memang terjadi diskriminasi *Kompas* akan memberitakan tetapi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh etnis Tionghoa *Kompas* juga akan memberitakan.

Hal lainnya yang muncul melalui serangkaian tahapan analisis yang penulis lakukan adalah *Kompas* memenuhi fungsi media bagi masyarakat yaitu sebagai *surveillance* (pengawasan, pengamatan) dimana pada Pemilu 2004, *Kompas* memberitakan mengenai etnis Tionghoa yang masih kesulitan dalam memberikan hak pilihnya karena di haruskan memiliki SBKRI untuk mengingatkan masyarakat dan

pemerintah bahwa sebenarnya peraturan SBKRI yang mendiskriminasi etnis Tionghoa tersebut sudah tidak berlaku lagi.

B. Saran

Dalam penelitian ini, tentunya masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan baik pada proses maupun hasil dari penelitian. Selama proses penelitian terdapat banyak kendala yang dialami penulis, pada level teks, penulis seringkali mengalami kesulitan dalam menganalisis makna pada kata atau kalimat yang penulis teliti, bahkan mungkin juga penulis tidak teliti dalam membedah makna yang terkandung di dalam teks berita yang penulis teliti. Kesulitan juga penulis alami dalam menentukan *frame* dari berita yang diteliti, sehingga terdapat kemungkinan penulis kurang tepat dalam menangkap *frame* pada berita yang diteliti.

Pada level konteks, penulis juga tidak mulus-mulus saja di dalam melakukan analisis, terdapat berbagai kendala yang sedikit menghambat penulis seperti terbatasnya waktu narasumber yang dapat diwawancarai, terbatasnya jumlah narasumber yang dapat di wawancarai, dimana pada saat penulis melakukan wawancara, oleh pihak *Kompas* hanya diperbolehkan mewawancarai satu narasumber dari pihak *Kompas*, sehingga kemudian penulis mencoba menghubungi secara pribadi narasumber yang ingin penulis wawancara. Kesulitan juga penulis alami dalam menggabungkan antara analisis pada teks berita dengan analisis konteks, dimana pada analisis tersebut dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar bisa menangkap *frame* yang digunakan pada berita yang penulis teliti.

Kelemahan lain pada penelitian ini adalah penulis hanya melihat *frame* dari satu media saja yaitu *Kompas*. Padahal banyak hal juga yang masih bisa digali mengenai wacana ini, misal membandingkan dengan media lain misalnya Tempo atau Media Indonesia. Penelitian ini menggunakan perangkat *framing* model Pan dan Kosicky yang lebih mengfokuskan meneliti media melalui struktur bahasa yang digunakan dalam mengkonstruksi realitas sehingga tidak menutup kemungkinan jika wacana penelitian ini juga bisa di analisis dengan perangkat *framing* model lain misalnya perangkat *framing* Gamson dan Modigliani yang tak hanya melihat struktur bahasa yang digunakan tetapi lebih sensitif dengan melihat bahasa secara mikro. Penelitian ini juga bisa lebih diperdalam dengan mewawancarai narasumber yang terkait misalnya tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa. Selain itu penelitian ini juga bisa di kaji dengan menggunakan metode lainnya seperti analisis isi kuantitatif atau bisa juga dengan menggunakan analisis wacana.

Selain beberapa saran akademis yang penulis sampaikan di atas yang kemudian dapat menjadi masukan dalam penelitian, penulis juga menyampaikan saran praktis untuk *Kompas* sebagai bahan referensi dan masukan kepada *Kompas* agar lebih baik di dalam pemberitaannya. *Kompas*, sebagai media nasional diharapkan terus memegang teguh prinsip independensi yang selama ini sudah di anut *Kompas* agar *Kompas* tetap menjadi media yang netral dan kredibilitas *Kompas* tetap terjaga dengan baik.

Daftar Pustaka

- Eriyanto, 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LKiS,
- Hamad, Ibnu. 2004. *Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Ibnu Hamad, Agus Sudiby, Muhammad Qodari, 2001. *Kabar-Kabar Kebencian Prasangka Agama Di Media Massa*, Jakarta : ISAI.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media , Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Liliweri, Alo, 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Margantoro, Y.B. 2001. *Biar Berita Bicara*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Nadapdap, Amir,dkk, 2003. *Jurnalisme Anti Toleransi? Rasialisme Dalam Pemberitaan Pers*. Medan: KIPPAS.
- Nugroho, Bimo. Eriyanto. F. Surdias, 1999, *Poltik Media Mengemas Berita*. Jakarta: ISAI.

Profil Harian Kompas, ” *Profil Kompas*”*Sejarah, Organisasi dan Visi Misi Kompas*”.

Database Pusat Informasi Kompas.

Sobur, Alex, 2002. *Analisis Teks Media. Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Siregar, Ashadi, dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa.*

Yogyakarta: Kanisius.

Scheufele, Dietram. 1999. *Framing as a Theory of Media Effects. Journal of Communication.* Vol 49. Madison: Inform Global

Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik.* Jakarta: TransMedia Pustaka

Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Sularto, ST. 2007. *Kompas Menulis Dari Dalam.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Yusup. Pawit M. 2007. *Komunikasi, Media, Sumber-sumber Informasi, dan Contoh Aplikasi Teori Massa Kontekstual.* Bandung:Rosda Karya

Wibowo,Ivan. 2008. *Pemikiran Tionghoa Muda : Cokin, So What Gitu Loh!.* Jakarta: Komunitas Bambu

Wibisono, Lily, 2006. *Etnik Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

TERBITAN BERKALA

SKH Kompas. *Aspirasi Politik Cina Benteng: Militer No, Antidiskriminasi Rasial*

Yes. Senin, 5 Januari 2004

SKH Kompas, Minggu, 12 November 2003

SKH Kompas, Senin, 3 Maret 2008

SKH Kompas, Jumat, 1 Juni 2001

SKH Kompas. *Diskusi Lingkar Muda Indonesia: Indonesia dan Fundamentalisme*
Ganda. Senin, 22 Mei 2006

SKH Kompas, Sabtu, 4 Oktober 2003

SKH Kompas, Senin, 25 Mei 2004

SKH Kompas, Senin, 2 Februari 2004

SKH Kompas, Sabtu, 16 Mei 2009

Suara Pembaruan, 21 Februari 2004

Internet

http://www.embassyofindonesia.org/consular/pdf/UU_no_12_th_2006.pdf

<http://ns1.cic.ac.id/~ebook/ebook/adm/myebook/0008.pdf>

www.Tempointeraktif.com: Artikel oleh Sunariah tanggal akses 28 Oktober 2008

www.kompas.com

www.partai.info, tanggal akses 30 Oktober 2008

www.suarapembaruan.com/News/2009/02/12/Editor/edit02.htm, tanggal akses 6

Maret 2009

www.bappenas.go.id/get-file-sever/node/6126/, tanggal akses 12 Mei 2010

<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/21/Editor/edi2.htm>, tanggal akses 30

Oktober 2008





SURAT KETERANGAN
No : 15/SDM-Diklat/III/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

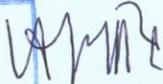
Nama : Devi Krismawati
NIM : 02227/Kom
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

telah melakukan wawancara di Harian Kompas dengan Kepala Desk Politik-Hukum dan HAM, Sdr. Tri Agung Kristanto guna penyusunan skripsi dengan judul *"Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Media Nasional (Analisis Framing Pemberitaan tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Surat Kabar Kompas Edisi Oktober 2003-September 2004, dan Edisi Mei 2009)."*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Jakarta, 15 Maret 2010

Harian Pagi
KOMPAS
Jl. Palmerah Selatan 2
JAKARTA
Manajer Pendidikan & Pelatihan
Agnes Aristiarini



PUSAT INFORMASI KOMPAS
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
 Fax. 5347743
 =====

KOMPAS, Sabtu, 04-10-2003. Halaman: 6

ETNIS TIONGHOA AKAN MENDUKUNG CALON PRESIDEN
 YANG BISA HAPUSKAN DISKRIMINASI

Jakarta, Kompas

Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 mendatang, etnis Tionghoa berjanji tidak akan memilih lagi partai politik yang telah mengecewakan mereka. Sebaliknya, mereka akan mendukung penuh partai maupun calon presiden yang dianggap bisa menghapuskan diskriminasi di Indonesia.

Pandangan itu mengemuka dalam diskusi bertopik "Peran Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004" yang diadakan Koordinatoriat Wartawan Peliput DPR bekerja sama dengan International Foundation for Election System (IFES), Jumat (3/10).

Hadir sebagai pembicara adalah Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa IG Hertanto T Surya, Ketua Umum DPP Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) Lieus Sungkharisma, dan Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa Eddie Lembong.

Lieus dalam kesempatan sama juga menjelaskan bahwa di masa lalu masyarakat Tionghoa umumnya selalu cari aman dalam menentukan pilihan politik. Meski demikian, dengan adanya reformasi dan berbagai pendidikan politik, hal tersebut tidak akan banyak terjadi lagi. "Sekarang kalau ada partai yang mengecewakan, tidak akan dipilih lagi karena mereka sudah tidak takut-takut lagi," ucapnya.

Harus bersatu

Sementara itu, Ketua MPR Amien Rais mengatakan bahwa jangan sampai ada kelompok mana pun di negara ini yang dipinggirkan atau merasa terpinggirkan. "Orang yang melakukan peminggiran ataupun orang yang merasa terpinggirkan ini tidak akan produktif bagi usaha membangun bangsa," kata Amien Rais saat berdialog dengan komunitas Tionghoa di Surabaya, Kamis.

Menurut Amien, persoalan yang dihadapi bangsa ini memang membutuhkan dukungan semua pihak untuk menyelesaikannya. "Karena itu, kita semua harus bersatu untuk memperbaikinya," ujarnya. Masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia sebenarnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara Indonesia. Untuk itulah pengaturan SKBRI seharusnya tidak diperlukan lagi.

"Peraturan itu diskriminasi, jadi harus dihapuskan. Itulah janji saya jika jadi presiden," ujarnya. (sut/mam)

PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Senin, 24-05-2004. Halaman: 6

PERLU, SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMUDA TIONGHOA

Jakarta, Kompas

Sosialisasi sosial dan politik dirasakan perlu disampaikan kepada generasi muda etnis Tionghoa. Dengan sosialisasi itu, diharapkan generasi muda Tionghoa bisa mengetahui dan berperan dalam berbagai aktivitas sosial politik.

Hal itu mengemuka dalam diskusi "Kebangkitan Partisipasi Sosial Politik Generasi Muda Tionghoa Indonesia Menuju Indonesia Baru" yang diselenggarakan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti), Sabtu (22/5). Hadir sebagai pembicara adalah Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Stanley Adi Prasetya, anggota Komnas HAM Chandra Setiawan, dan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Christine S Tjih. "Sedikit sekali kaum etnis Tionghoa yang mau berorganisasi dan terjun ke sosial politik, mungkin hanya 30 persen. Padahal sebagai minoritas kita harus bangkit untuk lebih menonjolkan dan memperjuangkan kepentingan kaum Tionghoa," kata Chandra.

Chandra pun berpendapat, dengan sosialisasi sosial politik, keterlibatan kaum muda Tionghoa dalam bidang sosial politik dapat mengangkat kaum Tionghoa yang masih minoritas terutama di bidang politik. "Bisa saja nanti kaum Tionghoa mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan siapa pemimpin bangsa ini, misalnya tidak mau dari kalangan militer karena tidak aman atau hal-hal lainnya yang berpengaruh," ungkap Chandra.

Hal senada diungkapkan Stanley Adi Prasetya. Ia mengatakan saat ini banyak sekali kaum etnis Tionghoa yang bergabung menjadi tim sukses calon presiden tetapi tidak dapat diketahui jelas apakah mereka memang mewakili kaum Tionghoa atau hanya untuk kepentingan bisnisnya. "Jangan-jangan presiden terpilih malah mengeluarkan kebijakan yang bisa merugikan bisnis kaum Tionghoa, kita lihat saja nanti," katanya. (SIE)

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
 Fax. 5347743
 =====

KOMPAS, Rabu, 12-11-2003. Halaman: 8

KETURUNAN TIONGHOA BELUM TERCATAT SEBAGAI PEMILIH

Jakarta, Kompas

Diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa terbukti belum juga hilang walaupun semua pejabat sudah gembar-gembor persamaan hak.

Warga keturunan Tionghoa malah kemungkinan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2004 karena mereka belum tercatat sebagai calon pemilih. Alasannya, banyak yang tidak memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sehingga mereka sulit mendapat surat lain, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi syarat pencatatan pemilih. -> Depichon

Menurut Frans Hendra Winata, pendiri Lembaga Anti Diskriminasi di Indonesia (LADI), di Jakarta, Selasa (11/11), ini terjadi pada sejumlah kantong warga keturunan Tionghoa, seperti Kalimantan, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung.

Direktur Eksekutif LADI Rebeka Harsono menyebut pada sejumlah daerah pecinan masih banyak warga yang belum tercatat sebagai calon pemilih pada Pemilu 2004, seperti Jembatan Lima, Jembatan Tiga, Jembatan Dua, Muara Angke, dan Teluk Gong di Jakarta Utara atau di Tangerang.

Menurut Hendra, keharusan memiliki SBKRI itu menjadikan banyak warga keturunan masuk kelompok warga tanpa kewarganegaraan (stateless).

Awalnya SBKRI adalah surat naturalisasi warga negara asing. Namun praktiknya, SBKRI juga berlaku bagi warga keturunan Tionghoa. Tanpa SBKRI, mereka kesulitan mengurus akta kelahiran, KTP, dan surat nikah yang diperlukan saat Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) untuk Pemilu 2004.

Kerumitan prosedural menjadikan kartu identitas sebagai barang mahal. Banyak warga keturunan yang memiliki KTP hasil "nembak". Namun, ini menyebabkan pengurusan surat nikah dan akta kelahiran tetap merupakan persoalan.

Karena itu, Rebeka berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa memfasilitasi persoalan tersebut agar warga keturunan Tionghoa bisa menggunakan Pemilu 2004 sebagai media penyaluran hak politik.

Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin yang ditemui terpisah menyebutkan, KPU tidak bisa memberi fasilitas khusus bagi warga mereka. KPU justru bisa dipersoalkan jika memberi perlakuan khusus. Masalah itu sepenuhnya urusan Departemen Dalam Negeri. (dik)

-> SBKRI -> keywords

PUSAT INFORMASI KOMPA S
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Senin, 02-02-2004. Halaman: 30

TKI DAN WARGA TIONGHOA TERANCAM TAK IKUT PEMILU

Jakarta, Kompas

Ratusan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan ribuan warga golongan Tionghoa terancam tidak bisa mengikuti Pemilihan Umum 2004. Penyebabnya adalah banyak TKI yang belum sempat terdaftar sebagai pemilih. Sementara itu, warga keturunan Tionghoa tidak terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak bisa mengikuti pemilu karena tidak memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) walaupun mereka sudah turun-temurun hidup di Indonesia.

Hal itu diungkapkan secara terpisah oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea serta advokat Frans Hendra Winarta di Jakarta, Jumat (30/1). Frans mengungkapkan, ribuan orang keturunan Tionghoa miskin tidak dapat menggunakan hak politiknya, yaitu hak pilih di Pemilu 2004, karena mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk. Sementara untuk mendapatkan KTP, mereka harus lebih dulu mengurus kepemilikan SBKRI.

"Itu terjadi di daerah-daerah pinggiran yang kalau di sekitar Jakarta misalnya di Jelambar, Jembatan Merah, Kota, Karawang, dan Bekasi. Mereka tak mampu mengurus SBKRI karena mahal. Di lapangan, biaya pengurusan SBKRI bisa mencapai Rp 3 juta sampai Rp 7 juta," tuturnya.

Padahal, kata Frans, dalam UU Kewarganegaraan, SBKRI sebenarnya diperlukan oleh orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia.

Akan tetapi, karena golongan Tionghoa sejak zaman kolonial Belanda dimasukkan dalam golongan Timur Asing seperti diatur dalam staatblad Hindia Belanda, maka warga keturunan Tionghoa itu tidak dianggap sebagai WNI. Perlakuan itu tetap berlangsung meski penjajahan berakhir dan Indonesia sudah merdeka.

Warga keturunan Tionghoa, walaupun turun-temurun hidup di Indonesia dan sebagian besar bahkan tidak pernah melihat daratan Cina, tetap dianggap orang asing kecuali jika mengajukan permintaan melalui pengurusan SBKRI.

"Akibat mahalnya pengurusan SBKRI, banyak orang Tionghoa miskin yang hak pilihnya menjadi gugur gara-gara SBKRI. Ini hak politik dan hak sipil yang harus dilindungi," kata Frans.

"Stelsel" aktif

Sementara itu, Jacob Nuwa Wea dalam siaran pers pekan ini menyatakan, ratusan ribu TKI di luar negeri terancam tidak ikut Pemilu 2004. Oleh karena itu, Mennakertrans mengimbau kepada Panitia Kerja Pemilu Luar Negeri (Panja PLN 2004) agar dapat mendaftarkan para TKI di seluruh negara penempatan di luar negeri untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004.

"Kepada seluruh Perusahaan Jasa TKI diminta ikut membantu memberikan data terakhir kondisi dan alamat TKI yang ditempatkan di luar negeri," kata Nuwa Wea.

Depnakertrans, kata dia, memang punya data TKI. Namun, kebanyakan alamat para TKI tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum pada data komputer. Hal itu bisa terjadi karena TKI tersebut pindah majikan atau memang pada data awalnya tidak benar.

Mennakertrans menegaskan, TKI adalah warga negara Republik Indonesia. Untuk itu, mereka harus mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004 sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Upaya ini untuk memberikan perlindungan dan pembelaan hak-hak TKI yang sedang bekerja di luar negeri.

"Harus kita catat, hasil Pemilu 2004 nanti kita perlu legitimasi internasional. Untuk itu, saya mintakan kepada Panja PLN 2004 agar para TKI yang tersebar di beberapa negara penempatan TKI, khususnya di negara Kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik, diberikan hak yang sama dalam pemilu," katanya.

Ia juga mengimbau agar Panitia Pemilihan Luar Negeri menggunakan sistem stelsel aktif dalam pendaftaran TKI sebagai pemilih, sebab para TKI banyak yang kerepotan jika mendaftar sendiri. Itu terjadi karena tidak semua TKI bisa meninggalkan pekerjaannya dan bahkan ada yang tidak diberikan izin oleh majikannya.

Nuwa Wea mengemukakan, ia sudah memerintahkan aparat di Depnakertrans untuk memberikan data TKI yang lengkap dengan nama TKI, nama majikan, dan alamat majikan untuk segera dikirim langsung kepada seluruh perwakilan RI di negara penempatan TKI atau melalui Panja PLN 2004 di Jakarta.

Kepada Panja PLN 2004, ia mengimbau agar kepada TKI diberikan kebijaksanaan untuk bisa mendaftar pemilu pada H minus 1, bukan H minus 14 seperti telah ditetapkan. Bahkan, kalau perlu mereka bisa langsung daftar dan langsung mencoblos. "Hal ini saya mintakan dengan alasan para TKI, khususnya nonformal, sulit mendapat izin meninggalkan rumah dan pekerjaannya," ujar NuwaWea. (*/BUR)

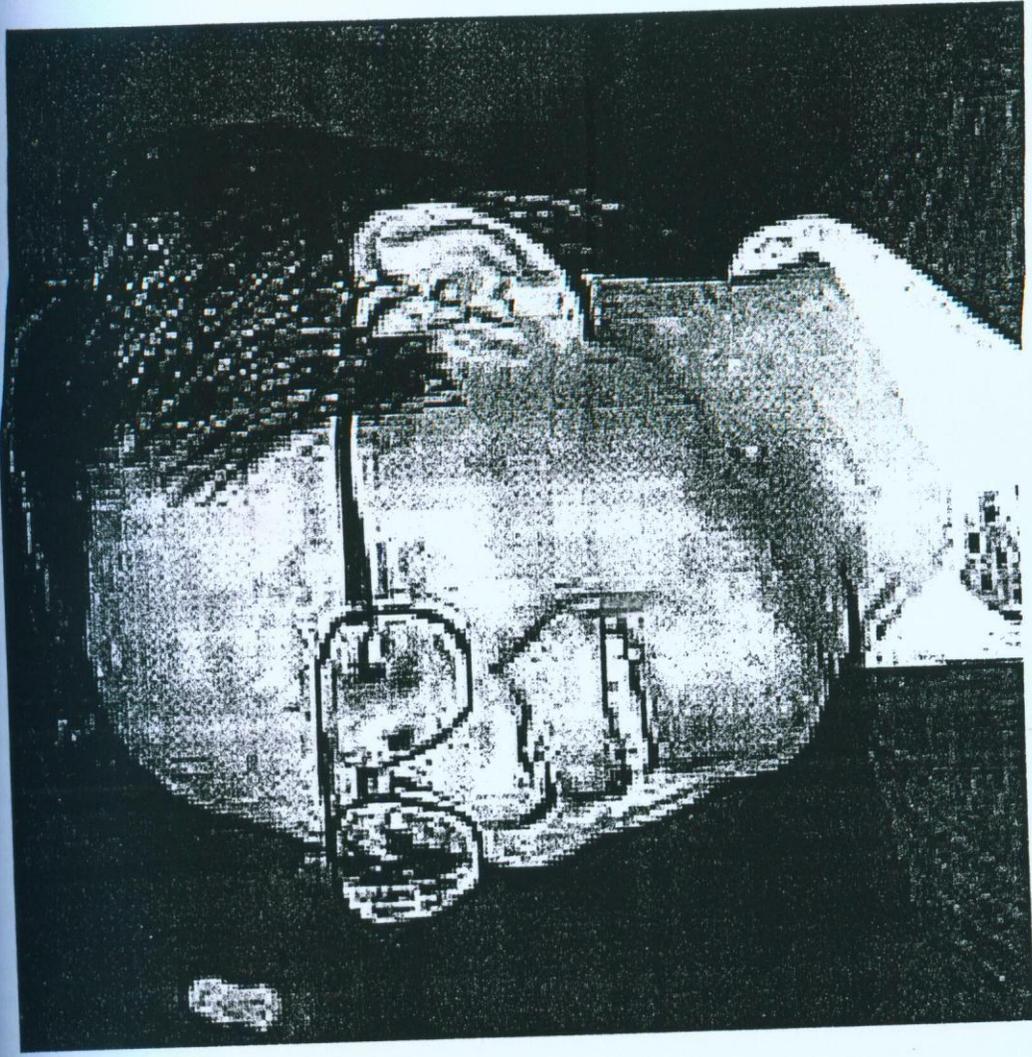
Foto:

JB Suratno

"Akibat mahalunya pengurusan SBKRI, banyak orang Tionghoa miskin yang hak pilihnya menjadi gugur gara-gara SBKRI. Ini hak politik dan hak sipil yang harus dilindungi."

**Akibat mahal nya
pengurusan SBKRI, ba-
nyak orang Tionghoa mis-
kin yang hak pilih nya
menjadi gugur gara-gara
SBKRI. Ini hak politik dan
hak sipil yang harus di-
lindungi.**

— FRANS HENDRA WINARTA



JB SURATNO

PUSAT INFORMASI KOMPAS
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200
Fax. 5347743
=====

KOMPAS, Sabtu, 16-05-2009. Halaman: 3

Pemilu Pilpres
SOFJAN WANANDI KAMPANYEKAN JK-WIN

Makassar, Kompas

Pengusaha nasional, Sofjan Wanandi, bersama sekitar 200 tokoh Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/5), mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto atau JK-Win.

Dalam sebuah acara bertajuk "Deklarasi Komunitas Tionghoa Pendukung (KTP) JK-Win" di Hotel Imperial, Makassar, Sofjan menilai, dari tiga calon presiden yang mencuat saat ini, hanya pasangan JK-Win yang mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis ekonomi dalam waktu 3-4 tahun mendatang.

"Pasangan capres-cawapres yang lain, saya nilai, hanya orang-orang yang pandai di belakang meja. Tidak ada yang mampu melakukan terobosan-terobosan untuk mengantarkan kita keluar dari berbagai krisis yang melanda dunia, bangsa, dan Tanah Air kita," katanya.

Bukan anti-China

Kepada komunitas Tionghoa di Makassar, Sofyan menyerukan bahwa dari kampung Jusuf Kalla inilah harus dikumandangkan ke segenap penjuru Tanah Air bahwa JK itu bukanlah tokoh antinonpribumi, bukan antinon-Muslim. "Ini penting karena tudingan miring seperti itu saat ini sedang diembuskan ke arah JK oleh lawan-lawan politiknya. Padahal saya kenal JK sudah 40 tahun lalu, saat dia menjadi Ketua KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Sulsel dan saya menjadi Ketua KAMI DKI Jakarta," tuturnya.

Sofjan juga menilai JK sukses menjadi juru damai di berbagai kancah konflik, seperti Maluku, Poso, dan Aceh. "Coba kalau dia tidak fair, bagaimana bisa mendamaikan suatu perang yang berbau ras, misalnya," katanya.

Tokoh masyarakat Tionghoa Makassar, Anton Obey, mengajak semua rekannya untuk membersihkan nama JK sebagai sosok yang anti-Tionghoa. "Kami masyarakat Tionghoa beserta keluarga dan seluruh karyawan yang bekerja pada kami akan ikut bekerja keras, berkorban bagi JK, untuk mengantarkan dia ke posisi RI-1," katanya.

Menurut Anton, komunitas Tionghoa itu memang minoritas, tetapi kalau semua bekerja sama, komunitas ini tidak dipandang sebelah mata.
(NAR)

Foto: 1
ANTARA/ADNAN

Dua warga keturunan Tionghoa memperlihatkan pin JK-Wiranto sebagai tanda dukungan saat Deklarasi Komunitas Tionghoa Pendukung Jusuf Kalla-Wiranto di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/5). Seluruh warga Tionghoa yang bermukim di Sulawesi Selatan siap memenangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto pada Pemilu Presiden 2009 mendatang.



ANTARA/ADNAN

Dua warga keturunan Tionghoa memperlihatkan pin JK-Wiranto sebagai tanda dukungan saat Deklarasi Komunitas Tionghoa Pendukung Jusuf Kalla-Wiranto di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/5). Seluruh warga Tionghoa yang bermukim di Sulawesi Selatan siap memenangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto pada Pemilu Presiden 2009 mendatang.

Analisis Teks Berita 1

Judul: Etnis Tionghoa Akan Mendukung Calon Presiden Yang Bisa Hapuskan Diskriminasi

Jenis Rubrik: Nasional

Edisi: Sabtu, 4 Oktober 2003

Analisis Seleksi dan Saliansi

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana: Etnis Tionghoa akan selektif dalam memilih partai politik maupun calon presiden.</p> <p>Pelibat wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etnis Tionghoa <p>Dalam wacana etnis Tionghoa akan selektif memilih partai politik maupun calon presiden, diangkatnya etnis Tionghoa dalam</p>	<p>Jenis wacana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai etnis Tionghoa akan selektif dalam memilih partai politik maupun calon presiden (paragraf 1,2,3 dan 4) 2. Penjelasan dan penjabaran kampanye 	<p><i>Placement</i> penjelasan mengenai etnis Tionghoa akan selektif dalam memilih partai politik maupun calon presiden terdapat dalam paragraf 1,2,3 dan 4. Sedangkan penjelasan dan penjabaran kampanye Amien Rais sebagai calon presiden</p>	<p>Depiction: secara sederhana dapat diartikan sebagai penggambaran suatu isu secara denotative</p> <ul style="list-style-type: none"> - “.....mereka akan mendukung penuh partai maupun calon presiden

<p>pemberitaan tersebut karena merupakan pihak yang mengemukakan bahwa mereka akan memilih partai politik dan maupun calon presiden yang dianggap mampu menghapus diskriminasi.</p> <p>- Pemerintah Indonesia.</p> <p>Dalam wacana ini pemerintah Indonesia termasuk dalam pelibat wacana karena pemerintah Indonesia adalah pihak yang melakukan diskriminasi terhadap</p>	<p>Amien Rais sebagai calon presiden kepada komunitas Tionghoa (paragraf 5 dan 6, 7)</p> <p>Jenis wacana (1) direpresentasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartawan ➤ Etnis Tionghoa akan mendukung calon presiden yang bisa hapuskan diskriminasi(judul) ➤ Menghadapi 	<p>kepada komunitas Tionghoa terdapat pada paragraf 5 dan 6, 7. Berita ini terdapat di halaman 6 pada rubrik Nasional.</p>	<p>yang dianggap bisa mengahapuskan diskriminasi di Indonesia.”(paragraf 1)</p> <p>Kalimat di atas merupakan isu yang muncul dalam wacana ini. dimana etnis Tionghoa mulai berani mengungkapkan pendapatnya dan berusaha memperjuangkan haknya agar tidak</p>
---	---	--	---

<p>etnis Tionghoa, misalnya mengenai SKBRI.</p> <p>- Koordinatoriat Wartawan Peliput DPR.</p> <p>Dalam wacana ini Koordinatoriat Wartawan Peliput DPR berperan sebagai pelibat karena merupakan pihak yang mengadakan diskusi yang bertopik “Peran Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004”</p> <p>Pelantun Wacana:</p> <p>- Ketua Umum DPP Partai Reformasi</p>	<p>Pemilu 2004, etnis Tionghoa berjanji tidak akan memilih lagi partai politik yang telah mengecewakan mereka, sebaliknya mereka akan mendukung penuh partai maupun calon presiden yang dianggap bisa menghapus</p>	<p>mengalami diskriminasi</p> <p>Catchphrases:</p> <p>secara sederhana diartikan sebagai frasa yang menarik kontras dan menonjol dalam suatu wacana umumnya berupa slogan atau jargon.</p> <p>- “bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara Indonesia.”(paragraf 6)</p>
---	---	---

<p>Tionghoa Indonesia(PARTI) Lieus Sungkharisma. Lieus dipilih sebagai narasumber karena Lieus berperan sebagai pembicara dalam diskusi bertopik “Peran Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004”.</p> <p>- Amien Rais Dipilih sebagai narasumber karena posisinya sebagai calon presiden pada Pemilu 2004.</p>	<p>an diskriminasi di Indonesia(pa ragraf 1) kalimat ini digunakan untuk menjelaskan bahwa etnis Tionghoa sudah mulai selektif dalam memilih partai politik maupun calon presiden.</p> <p>- Ketua Umum DPP Partai Reformasi Tionghoa Indonesia(P ARTI) Lieus Sungkharism</p>	<p>Frasa ini menja menarik karen <i>Kompas</i> menegaska bahwa etnis Tiongho adalah bagian da warga negar Indonesia sehingg tidak memerluka SBKRI. Keywords: secar sederhana dapa diartikan sebag sebuah kata atau bis juga frase yan menjadi inti sika atau bingkai yan dibuat atas sebu wacana. <i>Keyword</i> in bersifat denotati karena lebih luga dalam menyampaika</p>
--	--	--

	<p>a</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Di masa lalu masyarakat Tionghoa umumnya selalu cari aman dalam menentukan pilihan politik.(paragraf 4) ➤ Sekarang kalau ada partai yang mengecewakan, tidak akan dipilih lagi....(paragraf 4) <p>Kalimat ini digunakan untuk menjabarkan atau</p>		<p>pesan..</p> <p>-</p> <p>“diskriminasi”(paragraf dan 7)</p> <p>Melalui kata “diskriminasi” yang beberapa kali ditemukan pada berita ini yaitu pada paragraf 1 dan <i>Kompas</i> memeperlihatkan bahwa masih ada perbedaan terhadap etnis Tionghoa.</p>
--	--	--	---

	<p>menjelaskan bahwa etnis Tionghoa sudah takut lagi dalam memberikan suaranya .</p> <p>Jenis wacana (2) direpresentasikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amien Rais ➤ Jangan samapi ada kelompok manapun di Negara ini yang dipinggirkan atau merasa dipinggirkan (paragraf 5) ➤ Orang yang melakukan peminggiran 		
--	---	--	--

	<p>atau orang yang merasa terpinggirkan ini tidak akan produktif... (paragraf 5)</p> <p>➤ Persoalan yang dihadapi bangsa ini memang membutuhkan semua pihak untuk menyelesaikannya. (paragraf 5)</p> <p>➤ Masyarakat Tionghoa yang ada di</p>		
--	---	--	--

	<p>Indonesia sebenarnya sudah menjadi bagian yang sudah tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia. Untuk itulah pengaturan SKBRI seharusnya tidak diperlukan lagi.(paragra f 6)</p> <p>Kalimat-kalimat tersebut digunakan untuk menjelaskan</p>		
--	--	--	--

	<p>mengenai kampanye yang dilakukan Amien Rais di hadapan etnis Tionghoa di Surabaya</p>		
<p>Disini terlihat bahwa etnis Tionghoa mulai berani dalam mengemukakan suaranya dengan lebih selektif dalam memilih partai politik maupun calon presiden serta kampanye Amien Rais sebagai calon presiden terhadap komunitas Tionghoa.</p>	<p><i>Kompas</i> memberikan penekanan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian dari warga negara Indonesia yang masih mengalami diskriminasi.</p>	<p>Media Frame</p> <p><i>Kompas</i> membuat penonjolan terhadap sebagai warga negara Indonesia masih mengalami diskriminasi. Selain itu <i>Kompas</i> juga memperlihatkan etnis Tionghoa mulai berani dalam mengemukakan suaranya dengan lebih selektif dalam memilih partai politik maupun calon presiden. Terdapat juga penonjolan terhadap Amien Rais yang melakukan kampanye calon presiden kepada etnis Tionghoa dengan mengemukakan akan menghapus diskriminasi.</p>	



Analisis Teks Berita 2

Judul: Perlu, Sosialisasi Politik Bagi Pemuda Tionghoa

Jenis Rubrik: Politik dan Hukum

Edisi: Senin, 25 Mei 2004

Analisis Seleksi dan Saliansi

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek Wacana:</p> <p>Sosialisasi sosial dan politik perlu disampaikan kepada generasi muda etnis Tionghoa harapannya agar generasi muda Tionghoa bisa mengetahui dan berperan dalam berbagai aktifitas sosial politik.</p> <p>Pelibat wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generasi muda Tionghoa 	<p>1. Penjelasan mengenai perlunya sosialisasi sosial dan politik kepada generasi muda Tionghoa serta harapan akan sosialisasi tersebut.(paragraf 1,2)</p> <p>2. Penjelasan mengenai manfaat sosialisai</p>	<p><i>Placemen</i></p> <p>t</p> <p>penjelasa</p> <p>n</p> <p>mengenai</p> <p>sosialisas</p> <p>i sosial</p> <p>dan</p> <p>politik</p> <p>perlu</p> <p>disampai</p> <p>kan</p> <p>kepada</p> <p>generasi</p> <p>muda</p> <p>etnis</p>	<p>Metafora:</p> <p>- “ Sedikit sekali kaum etnis Tionghoa yang mau berorganisasi dan terjun ke sosial politik...”(paragraf 2)</p> <p>Kata “terjun” secara harafiah mempunyai arti melompat turun,</p>

<p>Dalam wacana sosialisasi politik bagi pemuda Indonesia, generasi muda Tionghoa merupakan pihak yang perlu mendapatkan sosialisasi agar bisa mengetahui dan berperan dalam berbagai aktifitas sosial politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) 	<p>politik bagi generasi muda Tionghoa (paragraf 3,4)</p> <p>Jenis Wacana (1) direpresentasikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu, sosialisasi politik bagi pemuda Indonesia (judul) ➤ Sosialisasi sosial dan politik dirasakan perlu disampaikan kepada 	<p>Tionghoa harappannya agar generasi muda Tionghoa bisa mengetahui dan berperan dalam berbagai aktifitas sosial politik terdapat dalam paragraf 1,2. Kemudian</p>	<p>menceburkan diri ke dalam, turut serta. Disini pemilihan kata “terjun” sebenarnya mempunyai arti masuk ke dunia sosial politik. kata “terjun” mempunyai maksud yang berlebihan, hal wartawan hanya ingin menyampaikan bahwa jarang sekali etnis Tionghoa yang mau masuk atau ikut serta dalam dunia politik.</p> <p>- “..keterlibatan kaum muda Tionghoa dalam</p>
<p>Dalam wacana ini INTI berperan sebagai pihak yang mengadakan diskusi</p>	<p>perlu disampaikan kepada</p>	<p>1,2. Kemudian</p>	<p>..keterlibatan kaum muda Tionghoa dalam</p>

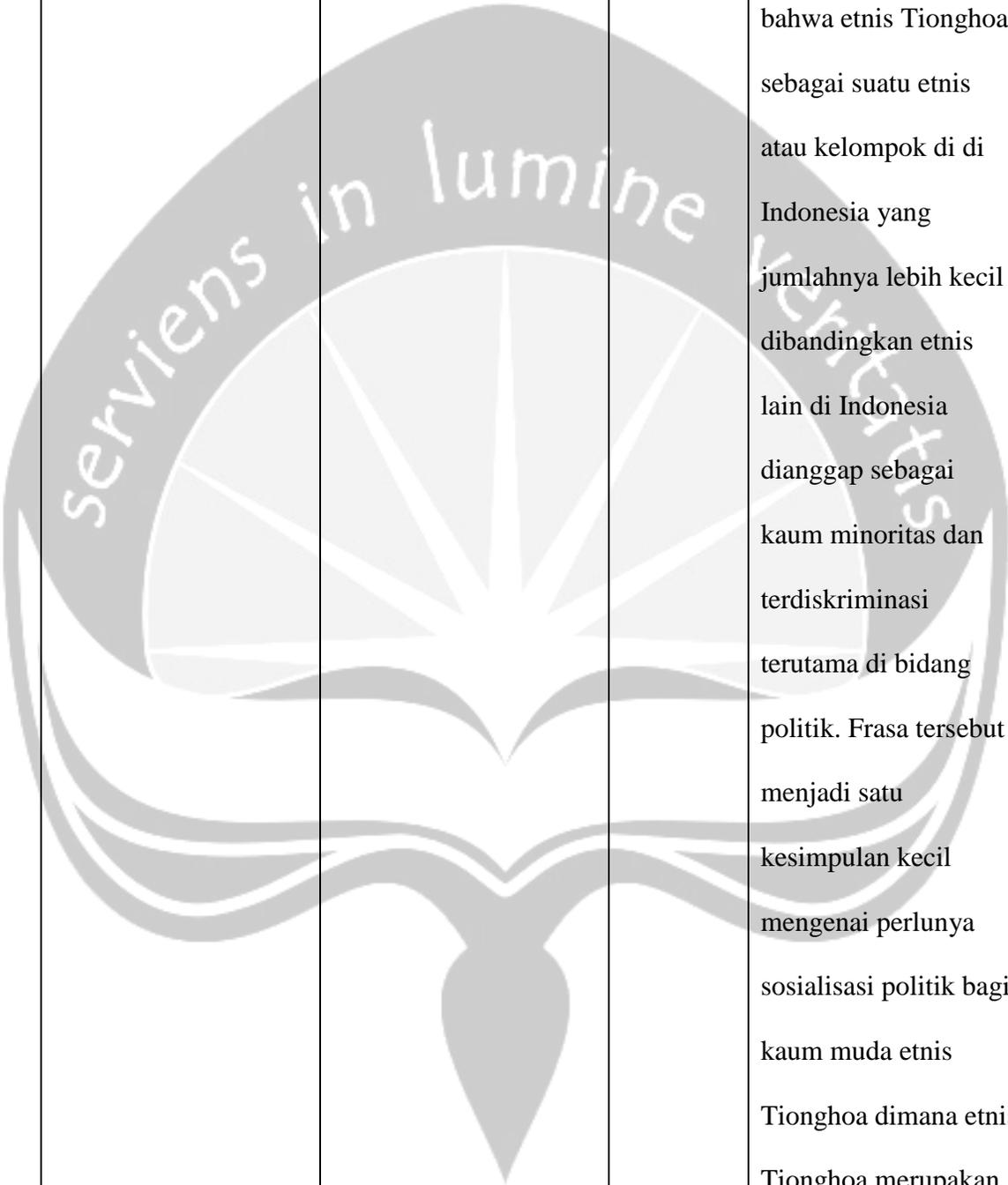
mengenai “ Kebangkitan Partisipasi Sosial dan Politik Generasi Muda Tionghoa Indonesia menuju Indonesia Baru” Pelantun wacana: - Anggota Komnas HAM Chandra Setiawan Dalam wacana ini Chandra berperan sebagai pembicara dalam diskusi mengenai “ Kebangkitan Partisipasi Sosial dan	generasi muda etnis Tionghoa.(paragraf 1) ➤ Dengan sosialisasi itu, di harapkan generasi muda Tionghoa... (paragraf 1) - Anggota Komnas HAM Chandra Setiawan ➤ Sedikit sekali kaum muda etnis Tionghoa	<i>placemen</i> <i>t</i> mengenai penjelasa n tentang manfaat sosialisas i politik bagi etnis Tionghoa terletak pada paragraf 3 dan 4. Berita ini terdapat di halaman 6 pada rubrik Politik	bidang sosial politik dapat <u>mengangk</u> at kaum Tionghoa yang masih minoritas terutama di bidang politik.”(p aragraf 3) Dalam arti harafiah kata mempunyai arti membawa ke atas, menaikkan, meninggikan. Kata “mengangkat” merupakan
---	---	---	--

Politik Generasi Muda Tionghoa Indonesia menuju Indonesia Baru”	yang mau berorganisa si dan terjun ke sosial politik...(pa ragraf 2)	dan Hukum.	perumpamaan. Pemilihan kata mengangkat dalam kalimat ini sebenarnya mempunyai makna bahwa etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas mempunyai posisi atau kedudukan yang lebih rendah terutama dalam bidang politik dibandingkan dengan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia.Oleh karena dengan kaum muda etnis Tionghoa yang mau terjun dalam dunia politik diharapkan mampu membuat posisi etnis Tionghoa menjadi
- Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Stanley Adi Prasetya	Kalimat ini digunakan untuk menjelaskan mengenai sosialisasi sosial dan politik bagi generasi muda Tionghoa Indonesia		
Dalam wacana ini Stanley berperan sebagai pembicara dalam diskusi mengenai “ Kebangkitan Partisipasi Sosial dan Politik Generasi	Jenis wacana (2) direpresentasikan oleh: - Anggota Komnas HAM Chandra Setiawan ➤ Bisa saja		

<p>MUda Tionghoa Indonesia menuju Indonesia Baru”</p>	<p>nanti kaum Tionghoa mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan siapa pemimpin bangsa ini...(parag raf 3) - Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Stanley Adi Prasetya ➤ Saat ini banyak sekali kaum</p>	<p>lebih baik atau sejajar dengan etnis-etnis lainnya terutama di bidang politik. Depiction: - “Sedikit sekali kaum etnis Tionghoa yang mau berorganisasi dan terjun ke sosial politik, mungkin hanya 30 persen. Padahal sebagai</p>
---	--	---

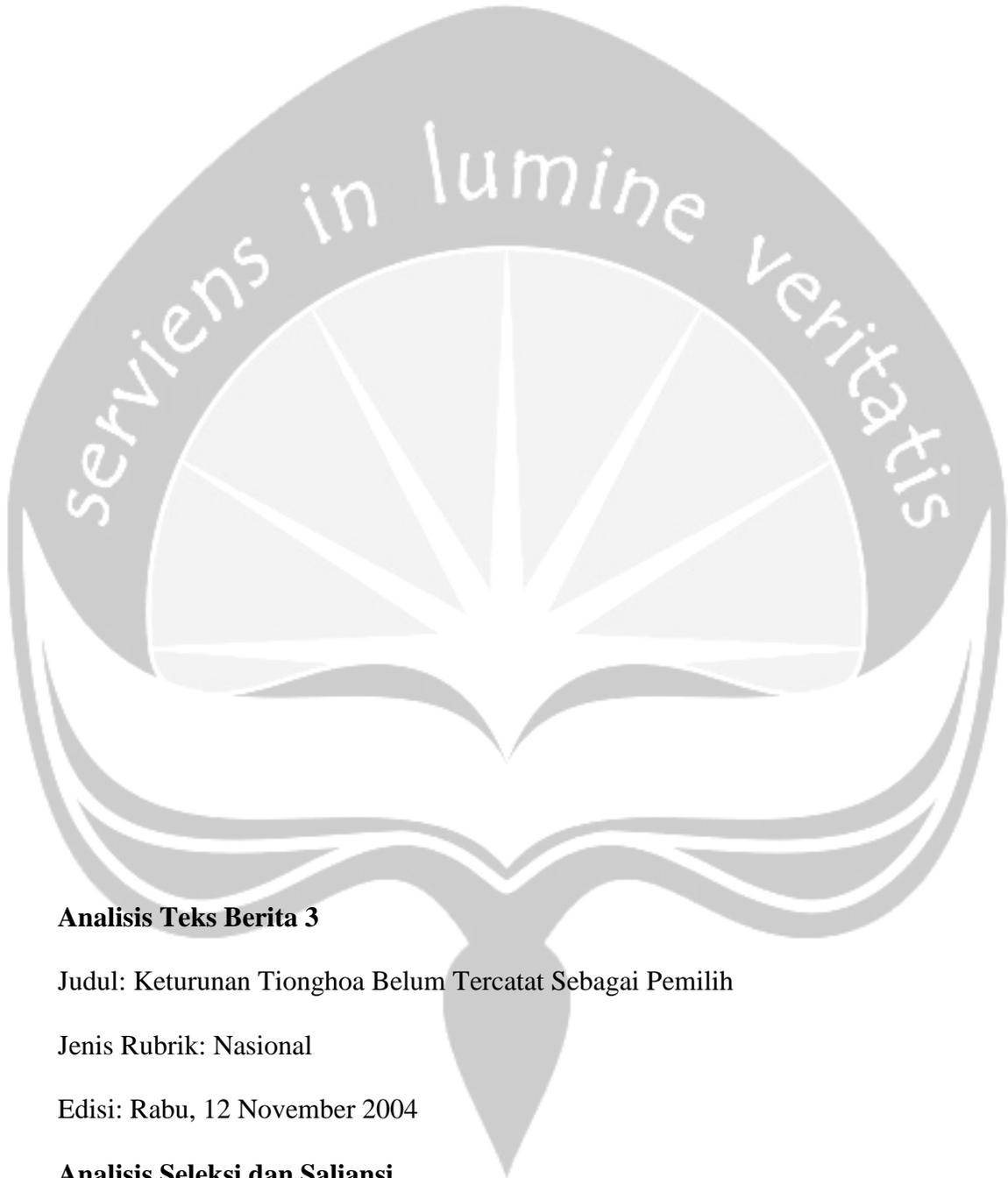
	<p>etnis Tionghoa yang bergabung menjadi tim sukses calon presiden tetapi tidak dapat diketahui jelas apakah mereka memang mewakili kaum Tionghoa... .(paragraf 4)</p> <p>Kalimat ini digunakan</p>		<p>minoritas kita harus bangkit untuk lebih menonjolkan dan memperju angkan kepenting an kaum Tionghoa” (paragraf 2)</p> <p>Kalimat tersebut merupakan isu yang muncul dalam berita ini. Dimana masih sangat sedikit kaum etnis Tionghoa yang mau terjun dalam</p>
--	---	--	---

	<p>untuk menjelaskan mengenai manfaat sosialisasi sosial dan politik bagi generasi muda Tionghoa Indonesia.</p>	<p>dunia sosial politik.</p> <p>Keywords:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “...kaum Tionghoa yang masih minoritas terutama dalam bidang politik”(paragraf 3) <p>Kata “minoritas” memiliki arti golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan itu.</p> <p>Frasa di atas</p>
--	---	---



			<p>mempunyai makna bahwa etnis Tionghoa sebagai suatu etnis atau kelompok di di Indonesia yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan etnis lain di Indonesia dianggap sebagai kaum minoritas dan terdiskriminasi terutama di bidang politik. Frasa tersebut menjadi satu kesimpulan kecil mengenai perlunya sosialisasi politik bagi kaum muda etnis Tionghoa dimana etnis Tionghoa merupakan kaum minoritas dan</p>
--	--	--	---

		terdiskriminasi dalam dunia politik sehingga mereka memerlukan sosialisasi dalam dunia politik.
Disini terlihat bahwa sosialisasi sosial dan politik diperlukan untuk generasi muda Tionghoa Indonesia yang merupakan kaum minoritas sehingga bisa mengetahui dan berperan dalam berbagai aktifitas sosial politik.	Disini terlihat bahwa <i>Kompas</i> menonjolkan bahwa sebagai kaum minoritas generasi muda etnis Tionghoa dirasa perlu untuk mendapatkan sosialisasi dalam bidang politik dan sosial.	
<p>Media Frame</p> <p>Dalam berita ini <i>Kompas</i> ingin menonjolkan bahwa generasi muda etnis Tionghoa sebagai kaum minoritas dirasa perlu mendapatkan sosialisasi dalam bidang politik dan sosial</p>		



Analisis Teks Berita 3

Judul: Keturunan Tionghoa Belum Tercatat Sebagai Pemilih

Jenis Rubrik: Nasional

Edisi: Rabu, 12 November 2004

Analisis Seleksi dan Saliansi

Analisis Seleksi	Analisis Saliansi
------------------	-------------------

Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana:</p> <p>Keturunan Tionghoa belum tercatat sebagai pemilih</p> <p>Pelibat wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etnis Tionghoa <p>Dalam wacana keturunan Tionghoa belum tercatat sebagai pemilih karena mereka sebagai pihak yang dalam Pemilu 2004 kemungkinan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p>	<p>Jenis wacana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan dan penjabaran diskriminasi terhadap warga Tionghoa (paragraf 1-4) 2. Penjabaran pentingnya SKBRI dan penjabaran latar belakang kesulitan mendapatkan SKBRI (paragraf 5 dan 6) 3. Penjelasan sikap 	<p><i>Placement</i></p> <p>mengenai penjelasan dan penjabaran diskriminasi terhadap warga Tionghoa terdapat pada paragraf</p>	<p>Metafora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “....KTP hasil <u>nembak</u>”. <p>(paragraf 7)</p> <p>Kata “nembak” dalam arti harafiah mempunyai arti saling melepaskan peluru dengan senjata api. Tetapi disini kata “nembak” digunakan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan sesuatu yang didapatkan dengan cara pintas atau tidak</p>

<p>- Pemerintah /pejabat pemerintah</p>	<p>pemerintah(para graf 7)</p>	<p>1-4. <i>Placeme nt</i></p>	<p>mengikuti prosedur yang berlaku yaitu membayar orang</p>
<p>Dalam wacana ini pemerintah/pejabat pemerintah berperan sebagai pelibat karena pemerintah/pejabat pemerintah berperan sebagai pihak yang melakukan diskriminasi dengan adanya peraturan tentang keharusan memiliki SKBR bagi warga keturunan Tionghoa.</p>	<p>Jenis wacana (1)</p> <p>- Wartawan</p> <p>➤ Diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa terbukti belum juga hilang walaupun semua pejabat sudah gambar gembor persamaan hak(paragraf 1)</p>	<p>mengen ai penjabaran pentingn ya SKBRI dan penjabaran latar belakan g kesulita n</p>	<p>untuk memudahkan dalam mengurus suatu hal, dalam hal ini adalah mengenai pengurusan KTP.</p> <p>- “.....g <u>embar-gembor</u> persamaan hak.”(para graf 1)</p> <p>Kata “gambar-gembor” memiliki makna kiasan dan</p>
<p>- KPU</p> <p>Dalam wacana Keturunan Tionghoa belum tercatat sebagai</p>	<p>persamaan hak(paragraf 1)</p>	<p>mendap atkan SKBRI terdapat</p>	<p>sedikit berlebihan. Kata “gambar-gembor” sebagai sebuah kiasan untuk</p>

<p>pemilih, diangkatnya Komisi Pemilihan Umum(KPU) dalam pemberitaan , karena peran KPU untuk memfasilitasi persoalan warga Tionghoa yang belum tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu 2004</p> <p>Pelantun wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendi Lembaga Anti Diskrimina si di Indonesia (LADI) Frans Hendra 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Banyak warga Tionghoa yang tidak memiliki SKBRI sehingga mereka sulit mendapatka n surat lain termasuk kartu tanda penduduk (KTP)....(pa ragraf 2) - Frans Hendra Winata ➤ Ini terjadi pada sejumlah 	<p>pada paragraf 5 dan 6. Sedangk an <i>placeme nt</i> mengen ai penjelas an dan sikap pemerint ah terletak pada paragraf ketujuh. Berita ini terletak</p>	<p>menggambarkan bahwa para pejabat telah banyak dan seringkali menyampaikan mengenai adanya persamaan hak bagi etnis Tionghoa. - “.....kartu identitas sebagai barang mahal.”(p aragraf 6) Kata “barang mahal” mempunyai makna sesuatu yang mahal, langka atau sulit didapat. Pemilihan kata “barang mahal” dalam kalimat di atas</p>
--	--	--	---

<p>Winata</p> <p>Dalam wacana ini, diangkatnya Frans Hendra sebagai narasumber karena posisinya sebagai pendiri Lembaga anti Diskriminasi di Indonesia sehingga dianggap kompeten dalam memberikan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Eksekutif LADI Rebeka Harsono 	<p>kantong warga keturunan Tionghoa.... (pargaraf 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur LADI Rebeka Harsono ➤ Menyebut pada sejumlah daerah pecinan masih banyak warga belum tercatat sebagai pemilih....(p aragraf 4) 	<p>pada rubrik nasional halaman delapan.</p>	<p>mempunyai makna bahwa karena prosedur yang sulit dan terkadang ribet menjadikan kartu identitas sebagai barang yang sulit di dapatkan oleh etnis Tionghoa sehingga banyak dari etnis Tionghoa yang tidak mempunyai kartu identitas.</p> <p>Depiction:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Warga keturunan Tionghoa malah kemungki nan tidak bisa
<p>Dalam wacana ini, diangkatnya Rebeka sebagai narasumber karena posisinya</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>sebagai Direktur LADI</p>	<p>Jenis wacana(2) direpresentasikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawan ➤ SKBRI adalah surat naturalisasi warga negara asing.(paragraf 6) ➤ SKBRI berlaku bagi warga keturunan Tionghoa.(paragraf 6) ➤ Tanpa SKBRI, mereka kesulitan mengurus 		<p>menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004 karena mereka belum tercatat sebagai calon pemilih. Alasannya, banyak yang tidak memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik</p>
----------------------------------	--	--	---

	<p>akta kelahiran, KTP dan surat nikah....(paragraf 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frans Hendra Winata ➤ Kharusan memiliki SKBRI itu menjadikan banyak warga keturunan Tionghoa masuk dalam kelompok warga tanpa kewarganega 		<p>Indonesia(SBKRI) sehingga mereka sulit mendapat kan surat lain, termasuk KTP yang menjadi syarat pencatat an pemilih.”(paragraf 1)</p> <p>Kalimat di atas merupakan suatu isu yang disampaikan oleh <i>Kompas</i>, yaitu</p>
--	---	--	--

	<p>raan...(paragraf 5)</p> <p>Jenis wacana (3) direpresentasikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerumitan prosedural... (paragraf 7) ➤ Banyak warga keturunan Tionghoa memiliki KTP hasil “nembak”.... (paragraf 7) <p>Jenis wacana (4) direpresentasikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Eksekutif LADI 	<p>mengenai etnis Tionghoa yang tidak tercatat sebagai pemilih karena tidak memiliki SBKRI..</p> <p>Keywords:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “...SBKRI juga berlaku bagi warga keturunan Tionghoa.” (paragraf 6) <p>Pada frasa tersebut <i>Kompas</i> mencoba menjelaskan bahwa SBKRI yang sebenarnya merupakan surat naturalisasi bagi</p>
--	---	---

	<p>Rebeka Harsono</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rebeka berharap KPU bisa memfasilitasi persoalan tersebut(paragraf 8) - Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin ➤ KPU tidak memberikan fasilitas khusus bagi warga mereka. (paragraf 9) ➤ KPU justru 	<p>warga asing di Indonesia tetapi pada kenyataanya SBKRI juga berlaku bagi etnis Tionghoa. Disini Etnis Tionghoa masih saja di anggap sebagai warga asing, padahal keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah sejak berabad-abad lampau bahkan banyak di antara mereka yang memang lahir dan menetap di Indonesia.</p>
--	--	---

	<p>bisa dipersoalkan jika memberi perlakuan khusus.(paragraf 9)</p>		
<p>Disini terlihat bahwa etnis Tionghoa masih mengalami diskriminasi yaitu dengan dipersulit untuk mendapatkan SKBRI untuk membuat KTP sebagai persyaratan untuk menjadi pemilih dalam Pemilu 2004</p>			<p>Penonjolan diskriminasi dan kesulitan warga Tionghoa dalam mendapatkan SKBRI sebagai untuk membuat KTP sebagai persyaratan untuk menjadi pemilih dalam Pemilu 2004</p>
<p>Media Frame</p> <p><i>Kompas</i> menonjolkan masalah diskriminasi dan kesulitan mengurus SKBRI bagi warga Tionghoa. Wacana mengenai peran KPU di tempatkan pada paragraf terakhir menggambarkan <i>Kompas</i> secara hati-hati memberitakan peran KPU terhadap masalah tersebut.</p>			

Analisis Teks Berita 4

Judul: TKI dan Warga Tionghoa Terancam Tidak Ikut Pemilu

Jenis Rubrik: Rubrik khusus Pemilihan Umum 2004

Edisi: Senin, 2 Februari 2004

Analisis Seleksi dan Saliansi

Analisis Seleksi		Analisis Saliansi	
Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
Objek Wacana: TKI dan warga Tionghoa terancam tidak ikut Pemilu Pelibat Wacana: - Tenaga	Jenis wacana: 1. Penjelasan dan penjabaran tentang mengenai TKI dan warga Tionghoa terancam tidak ikut Pemilu serta hal-	<i>Placement</i> penjelasan dan penjabaran mengenai TKI dan warga	Metafora: - “turun- temurun” (paragraf 1 dan 5) Kata “turun- temurun”

<p>Kerja Indone sia(TKI) Dalam wacana ini merupakan pihak yang terancam tidak bisa menjadi pemilih karena posisinya sebagai warga negara Indonesia yang tidak menetap di Indonesia</p>	<p>hal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti Pemilu(paragraf 1- 3). 2. Penjelasan tentang latar belakang peraturan SBKRI bagi etnis Tionghoa, kegunaan SBKRI serta akibat yang harus di alami oleh etnis Tionghoa jika mereka tidak memiliki SBKRI. (paragraf 4-6) 3. Penjelasan mengenai pernyataan dari</p>	<p>Tionghoa terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 terdapat pada paragraf 1,2 dan 3. <i>Placement</i> penjelasan tentang latar belakang peraturan SBKRI bagi etnis Tionghoa, kegunaan SBKRI serta akibat yang harus di alami oleh</p>	<p>memperlihatkan bahwa dari beberapa generasi etnis Tionghoa sudah berada di Indonesia Depiction: - “Ratusan ribu tenaga kerja Indonesia(TKI) di luar negeri dan ribuan warga golongan Tionghoa terancam tidak bisa mengikuti Pemilu</p>
---	---	--	--

<p>- Warga golong an Tiongh oa Dalam wacana ini menjadi pelibat karena merupakan pihak yang tidak bisa menjadi pemilih karena statusnya tidak mempunya i SKBRI Pelantun Wacana:</p>	<p>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Jacob Nuwa Wea tentang ratusan TKI di luar negeri yang terancam tidak ikut Pemilu 2004 dan himbauan dari beliau kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendataan dan pendaftaran mengikuti Pemilu bagi para TKI yang berada di Luar Negeri.(paragraf 7-</p>	<p>etnis Tionghoa jika mereka tidak memiliki SBKRI. Terletak pada paragraf 4- 6. Sedangkan <i>placement</i> penjelasan mengenai pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertr ans) Jacob</p>	<p>2004.”(par agraf 1) Kalimat ini menjadi mnarik karena merupakan isu utama yang diangkat <i>Kompas</i> dalam berita ini. Keywords: - “.....tetap dianggap orang asing kecuali jika mengajuka n permintaa n melalui pengurusa n SBKRI.”</p>
---	--	--	---

<p>- Menteri i Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membidangi salah</p>	<p>14) Jenis wacana 1 direpresentasikan oleh: - Wartawan ➤ Ratusan ribu tenaga kerja Indonesia(TKI) di luar negeri dan ribuan warga golongan Tionghoa terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2004(paragraf 1) ➤ Banyak TKI yang belum sempat terdaftar</p>	<p>NuwaWea tentang ratusan TKI di luar negeri yang terancam tidak ikut Pemilu 2004 dan himbauan dari beliau kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendataan dan pendaftaran mengikuti Pemilu bagi para TKI</p>	<p>(paragraf 5) Penggunaan frasa “tetap dianggap orang asing” menjadi sebuah kesimpulan kecil dari wacana di atas, yaitu bahwa etnis Tionghoa di Indonesia yang walaupun sudah turun temurun hidup di</p>
--	--	---	--

<p>satunya mengenai TKI</p> <p>- Advokat Frans Hendra Winata</p> <p>Dalam wacana ini Frans menjadi narasumber karena posisinya sebagai advokat yang memiliki informasi mengenai etnis Tionghoa yang tidak dapat menggunakan hak pilih.</p>	<p>sebagai pemilih(paragraf 1)</p> <p>➤ Sementara itu, warga keturunan Tionghoa tidak terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak bisa ikut pemilu 2004 karena tidak memiliki SKBRI...(paragraf 1)</p> <p>- Frans Hendra Winarta</p> <p>➤ Frans mengungkapkan, ribuan orang</p>	<p>yang berada di Luar Negeri terletak pada paragraf 7-14. Berita ini terletak pada halaman 30 dalam rubrik khusus <i>Kompas</i> yaitu Pemilihan Umum 2004.</p>	<p>Indonesia dan sebagian besar bahkan tidak pernah melihat daratan Cina tetap di anggap warga negara asing dan diharuskan memiliki SBKRI jika ingin menjadi warga negara</p>
--	--	---	---

	<p>Tionghoa miskin tidak dapat menggunakan hak politiknya...(pa ragraf 2)</p> <p>Jenis wacana 2 direpresentasikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frands Hendra Winata ➤ Mereka tak mampu mengurus SKBRI karena mahal (paragraf 3) ➤ Padahal, kata Frans, dalam UU Kewarganegara 		<p>Indonesia.</p> <p>Visual Images</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto yang digunakan dalam berita ini adalah gambar dari narasumber seorang tokoh Tionghoa yaitu Frans Hendra Winarta yang di gambarkan sedang tersenyum disertai
--	---	--	--

	<p>an, SKBRI</p> <p>sebenarnya</p> <p>diperlukan oleh</p> <p>orang</p> <p>asing...(paragraf 4)</p> <p>➤ Akan tetapi,</p> <p>karena</p> <p>golongan</p> <p>Tionghoa sejak</p> <p>zaman colonial</p> <p>dimasukkan</p> <p>dalam Timur</p> <p>Asing...(paragraf 4)</p> <p>➤ Warga</p> <p>keturunan</p> <p>Tionghoa,</p> <p>walaupun turun</p> <p>temurun hidup</p> <p>di Indonesia</p>		<p>dengan</p> <p>keterangan</p> <p>mengenai</p> <p>mahalnya</p> <p>pengurusan</p> <p>SBKRI</p> <p>yang</p> <p>membuat</p> <p>warga</p> <p>miskin</p> <p>Tionghoa</p> <p>tidak dapat</p> <p>memberikan</p> <p>suaranya</p> <p>dalam</p> <p>Pemilu.</p>
--	---	--	---

	<p>dan sebagian besar bahkan tidak pernah melihat daratan Cina, tetap dianggap orang asing kecuali jika mengajukan permintaan mengenai pengurusan SKBRI.(paragraf 6)</p> <p>➤ Akibat mahal nya pengurusan SKBRI....(paragraf 7)</p> <p>Jenis wacana 3 direpresentasik</p>		
--	---	--	--

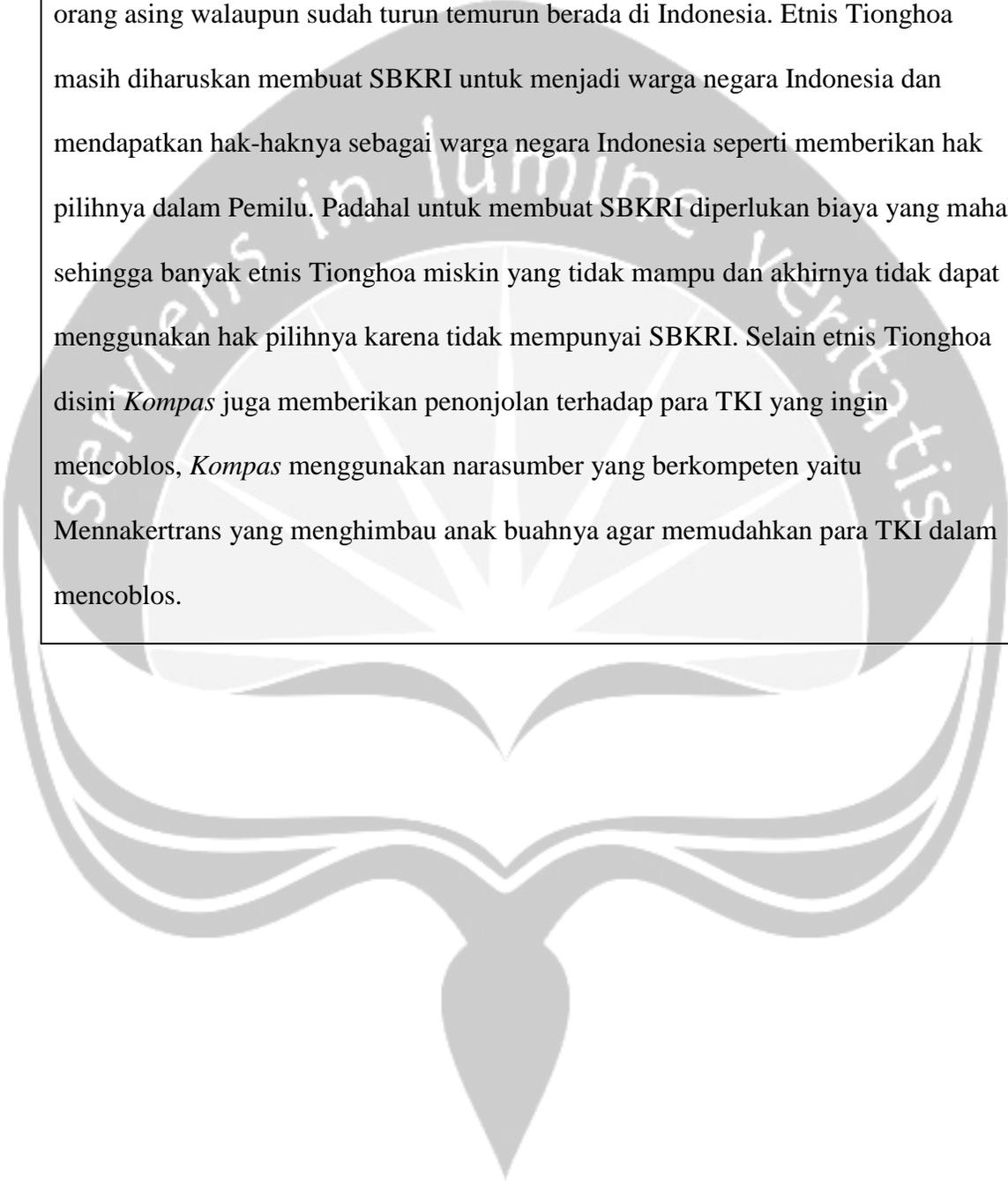
	<p>an oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawan ➤ Oleh karena itu, Mennakertrans mengimbau...(paragraf 8) ➤ Depnakernas, memang punya data TKI(paragraf 9) ➤ Mennakertrans menegaskan, TKI adalah warga Negara RI(paragraf 9) ➤ Untuk itu, mereka harus mendapatkan kesempatan 		
--	---	--	--

	<p>menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004(paragraf 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepada Panja PLN, ia mengimbau....(paragraf 15) ➤ Bahkan kalau prlu mereka bisa langsung daftar dan langsung mencoblos.(paragraf 15) <p>- Mennakertrans Jacob Nuwa Wea</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepada seluruh perusahaan jasa 		
--	--	--	--

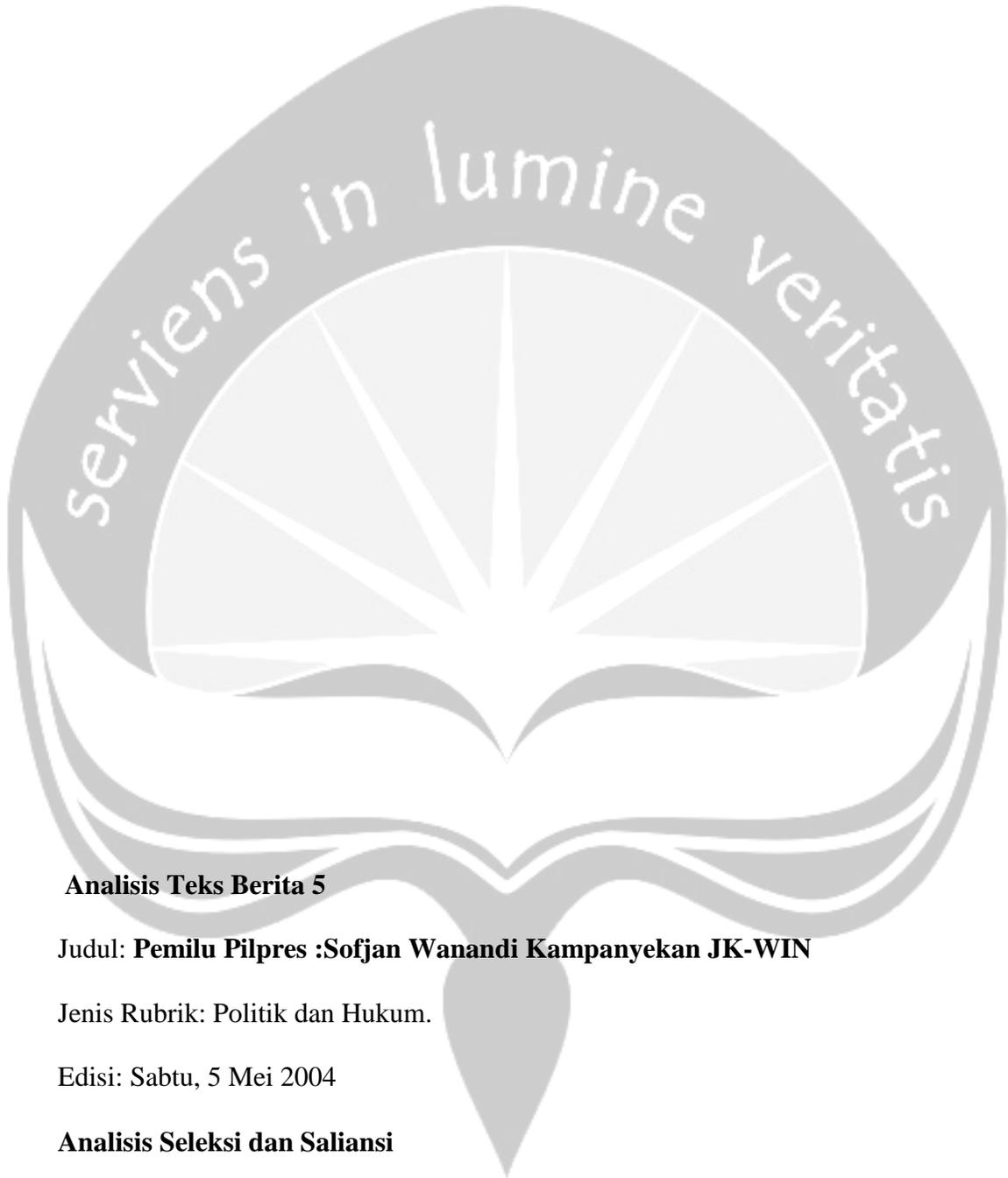
	<p>TKI diminta ikut membantu....(p aragraf 9) ▶ Untuk itu, saya mintakan kepada Panja PLN 2004 agar para TKI yang tersebar di beberapa Negara penempatan TKI, khususnya di Negara kawasan Timur Tengah dan Asia pasifik, diberikan hak yang sama</p>		
--	--	--	--

	<p>dalam</p> <p>pemilu(paragraf 12)</p> <p>➤ Hal ini saya mintakan dengan alasan para TKI...(paragraf 15)</p> <p>Jenis wacana 4 direpresentasikan oleh:</p> <p>- Wartawan</p> <p>➤ Ia juga mengimbau agar panitia Pemilu Luar Negeri menggunakan system stelsel...(paragraf 13)</p>		
--	---	--	--

	<p>➤ Ia sudah memerintahkan aparat di Depnakertrans ... (paragraf 14)</p>		
<p>Disini terlihat penonjolan terhadap bagaimana susahnya para TKI dan warga Negara Tionghoa untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu 2004</p>		<p>Disini terlihat bahwa warga Tionghoa yang sudah turun temurun berada di Indonesia masih dianggap warga asing bukan sebagai warga negara Indonesia dan hal tersebut berlangsung hingga saat Pemilu 2004 berlangsung dimana mereka masih di haruskan memiliki SBKRI sebagai bukti warga negara Indonesia yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi pemilih</p>	
<p>Media Frame</p>			



Kompas membuat penonjolan terhadap etnis Tionghoa yang masih saja di anggap orang asing walaupun sudah turun temurun berada di Indonesia. Etnis Tionghoa masih diharuskan membuat SBKRI untuk menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia seperti memberikan hak pilihnya dalam Pemilu. Padahal untuk membuat SBKRI diperlukan biaya yang mahal sehingga banyak etnis Tionghoa miskin yang tidak mampu dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mempunyai SBKRI. Selain etnis Tionghoa disini *Kompas* juga memberikan penonjolan terhadap para TKI yang ingin mencoblos, *Kompas* menggunakan narasumber yang berkompeten yaitu Mennakertrans yang menghimbau anak buahnya agar memudahkan para TKI dalam mencoblos.



Analisis Teks Berita 5

Judul: **Pemilu Pilpres :Sofjan Wanandi Kampanyekan JK-WIN**

Jenis Rubrik: Politik dan Hukum.

Edisi: Sabtu, 5 Mei 2004

Analisis Seleksi dan Saliansi

Analisis Seleksi	Analisis saliansi
------------------	-------------------

Struktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p>Objek wacana: Sofjan Wanandi dan 200 tokoh Tionghoa di makasar mendukung JK-Win</p> <p>Pelibat wacana: - JK – Win</p> <p>JK-Win dalam wacana ini, masuk dalam pemberitaan karena mereka adalah calon presiden dan wakil presiden yang</p>	<p>Jenis wacana : penjelasan dan penjabaran dukungan kepada JK-Win oleh Sofjan Wanandi dan 200 tokoh Tionghoa dijabarkan(tersebar di seluruh paragraf)</p> <p>Jenis wacana 1 direpresentasikan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawan ➤ Pengusaha nasional Sofjan Wanandi, bersama sekitar 200 tokoh Tionghoa Makasar , Sulawesi selatan, 	<p><i>Placemen</i></p> <p><i>t</i> penjelasa</p> <p>n dan penjabara</p> <p>n dukungan</p> <p>kepada JK-Win</p> <p>oleh Sofjan Wanandi dan 200 tokoh Tionghoa dijabarka</p> <p>n tersebar di seluruh paragraf.</p>	<p>Metafora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “ posisi RI-1.”(paragraf 6) <p>Penggunaan kata “Posisi RI-1” digunakan sebagai perumpamaan untuk menggantikan kata presiden.</p> <p>Depiction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - “ Pengusaha nasional,

<p>didukung oleh Sofjan Wanandi dan 200 tokoh Tionghoa di Makasar</p> <p>- Sofjan Wanandi di</p> <p>Dalam wacana ini Sofjan berperan sebagai pelibat karena posisinya sebagai pengusaha nasional yang menyerukan dukungan kepada JK-Win</p> <p>- 200 tokoh Tionghoa</p>	<p>mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres JK-Win(paragraf 1)</p> <p>➤ Sofjan menilai, dari tiga calon presiden yang mencuat saat ini, hanya pasangan JK-Win.....(paragraf 2)</p> <p>➤ Kepada komunitas Tionghoa di Makassar, Sofjan</p>	<p>Berita ini terdapat pada halaman 3. Berita ini dimasukkan dalam rubrik Politik dan Hukum.</p> <p>Berita ini merupakan <i>n expose</i> dukungan dan gerakan warga Tionghoa</p>	<p>Sofjan Wanandi, bersama sekitar 200 tokoh Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan Jumat(15/5), mendeklarasikan dukungan terhadap capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto</p>
---	---	--	---

<p>Makassar</p> <p>Dalam wacana ini, 200 warga Tionghoa berperan sebagai pihak yang mendukung JK-Win - Capres dan Cawapres lainnya</p> <p>Dalam wacana ini merupakan pelibat karena mereka adalah saingan dari JK-Win dalam Pemilihan Presiden 2009</p>	<p>menyerukan...(paragraf 4)</p> <p>➤ Sofjan juga menilai JK sukses dalam menjadi juru damai...(paragraf 5)</p> <p>➤ Menurut Anton, komunitas Tionghoa itu memang minoritas, tetapi kalau semua bekerja sama, komunitas ini tidak dapat dipandang sebelah mata(paragraf</p>	<p>atau JK-Win”(paragraf 1)</p> <p>Kalimat di atas adalah isu yang terdapat dalam berita ini, yaitu mengenai dukungan dari etnis Tonghoa terhadap capres dan cawapres JK-Win.</p> <p>Catchphrases:</p> <p>- “ Bukan anti-china”</p>
---	---	--

<p>Pelantun wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofjan Wanandi di Sofjan Wanandi dijadikan narasumber karena posisinya sebagai pengusaha nasional dan teman lama Jusuf Kalla . - Tokoh masyarakat Tionghoa Makasa 	<p>7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sofjan Wanandi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasangan capres dan cawapres lain, saya nilai, hanya orang-orang yang pandai di belakang meja(paragraf 3) ➤ Tidak ada yang mampu melakukan terobosan-terobosan....(paragraf 3) ➤ Ini penting karena tuduhan miring seperti 		<p>Penggunaan frasa tersebut di atas merupakan suatu jargon yang diserukan oleh pendukung JK-Win untuk menyampaikan bahwa pasangan tersebut bukanlah pasangan presiden yang anti dan mendiskriminasi etnis Tionghoa.</p> <p>Visual Images:</p>
--	--	--	---

<p>r Anton obey</p> <p>Dalam wacana ini Anton menjadi narasumber karena posisinya sebagai salah satu tokoh masyarakat Tionghoa dan dianggap berkompeten untuk memberikan informasi.</p>	<p>itu saat ini sedang diembuskan kearah JK-Win oleh lawan politiknya.</p> <p>➤ Padahal saya kenal JK sudah 40 tahun lalu...(paragraf 4)</p> <p>➤ Coba kalau dia tidak fair...(paragraf 5)</p> <p>- Anton obey</p> <p>➤ Kami masyarakat Tionghoa beserta keluarga dan</p>		<p>- Di gambarkan dua warga ketrunan etnis Tionghoa yang sedang memegang pin JK-Win sebagai bentuk dukungan kepada capres dan cawapres tersebut. dalam foto tersebut wajah dua warga Tionghoa tersebut tidak begitu terlihat jelas tetapi justru pin bergambar JK-</p>
---	---	--	--

	<p>seluruh karyawan yang bekerja pada kami akan ikut bekerja keras, berkorban bagi JK, untuk mengantarkan ia ke posisi RI-1 (paragraf (6))</p>	<p>Win yang lebih menjadi fokus.</p>
<p>Disini terlihat penonjolan terhadap dukungan oleh warga Tionghoa terhadap capres dan cawapres</p>	<p>Disini terlihat penekanan terhadap dukungan etnis Tionghoa kepada pasangan capres dan wapres JK-WIN. Selain itu JK-WIN ditonjolkan sebagai pasangan capres dan cawapres yang tidak antipribumi, tidak anti non-muslim dan selalu menyerukan perdamaian</p>	

Media Frame	
<p><i>Kompas</i> menonjolkan bahwa komunitas Tionghoa yang merupakan etnis minoritas sudah mulai berani menunjukkan suaranya dalam dunia politik dengan memberikan dukungan kepada JK-Win sebagai pasangan capres dan cawapres</p>	



HASIL WAWANCARA

A. Tri Agung Kristanto

Tanggal wawancara : 9 Maret 2010

Biodata

Nama : Tri Agung Kristanto

Tempat Tanggal lahir : Yogyakarta, 6 maret 1969

Jabatan: Kepala Desk Politik dan Hukum Kompas

1. Apakah anda bergaul dengan etnis Tionghoa?

Saya sekolah di De Britto sehingga saya bertemu dengan teman-teman Chinese, dan salah satu adik ipar saya Chinese, sahabat-sahabat saya juga Chinese, banyak bergaul dengan Chinese, saya punya pastor yang sangat dekat dengan saya juga Chinese. Jadi saya terbiasa bertemu dengan orang-orang Chinese.

2. Bagaimana pendapat anda tentang etnis Tionghoa? eksklusif kah?

Sebenarnya menurut saya sama saja ya, orang jawa juga bergaulnya, kumpul kumpulnya dengan orang jawa, orang madura kemana-kemana juga dengan orang Madura, orang batak berkumpulnya juga dengan orang batak, ya sama orang Tionghoa juga punya kecenderungan yang sama. Karena secara naluriah kita memang bisa lebih dekat kalau memiliki kesamaan. Contohnya: kalau misalnya orang batak sama orang Aceh, orang Bataknya pengen makan sang-sang, orang Acehnya kan tidak bisa. Jadi buat saya, eksklusifnya ya tidak juga, karena orang-orang yang lain

juga eksklusif. Karena mereka ngumpulnya dengan orang yang sama. Saya juga orang jawa ngumpulnya dengan orang jawa. Tapi dibidang tidak eksklusif juga tidak juga, karena memang menjadi persoalan ketika secara sederhana, kasat mata terlihat bahwa ada banyak perumahan-perumahan yang mayoritas penghuninya adalah orang Tionghoa, bukan hanya di Jakarta namun di banyak tempat, kan jarang kan ada perumahan batak, kalau bikin perumahan jawa di jawa kan menjadi aneh. Tetapi toh diluar Jawa Tengah dan Jogja dan Jawa Timur toh ada kampung jawa, misal di Bandung ada kampung Batak, ada kampung jawa di Kalimantan. Ya antara ya dan tidak kalau menyebutkan eksklusif, tetapi proses-proses dan memang ada sejumlah orang yang menjadi sangat eksklusif. Tetapi persoalan ini bukan hanya karena dia Chinese, tetapi juga karena tingkat kehidupannya, status sosial ekonominya yang cenderung membuat orang-orang menjadi eksklusif.

3. Tetapi kemudian yang muncul adalah diskriminasi terhadap Chinese, bagaimana menurut anda? misal tentang stereotipe-stereotipe yang ada pada etnis Tionghoa?

Diskriminasi ke etnis Tionghoa, harus diakui sampai saat ini di Indonesia masih terjadi karena proses sejarah, kalau kita belajar sejarah dulu tentang bagaimana pemerintahan Belanda memperlakukan etnis Tionghoa berbeda dengan keturunan lainnya, kan proses-proses ke diskriminasi dan memang tidak mudah kalau kita mau berbicara masalah tentang pembauran, kan memang banyak sekali persoalan-persoalan apalagi terkait dengan budayanya. Budaya etnis Tionghoa kan sangat

berbeda dengan budaya Jawa sementara budaya Arab memang berbeda dengan budaya Jawa, tetapi ketika sebagian masyarakat Jawa adalah Islam Khan menjadi lebih mudah dan cair, budaya Barat atau Eropa berbeda dengan budaya Jawa tetapi ketika tidak sedikit orang Jawa yang Kristen atau berpendidikan luar, kemudian perkawinan dengan gaya Eropa itu biasa sekali. Tetapi kalau Chinese itu sangat berbeda, itulah yang menjadi persoalan mengapa pembauran susah terjadi. Seperti misalnya tradisi barongsai dan liong itu hanya betul-betul ada di Chinese to...Sedangkan di Jawa adanya cuma macan dan ular.

4. Tentang SBKRI, sampai sekarang menjadi persoalan bagi etnis Tionghoa, misalnya dalam mengurus paspor atau KTP?

Kelihatannya sudah tidak ada, karena semenjak pemerintahan Gus Dur hal-hal seperti itu sudah dicabut.

5. Tetapi dalam prakteknya SBKRI masih sering ditanyakan ketika etnis Tionghoa mengurus misal KTP ataupun paspor, salah satu kasusnya pada pemilu kemarin ada beberapa etnis Tionghoa yang tidak bisa tercatat sebagai pemilih karena tidak memiliki SBKRI yang menjadi syarat pembuatan KTP, bagaimana menurut anda?

Saya kira itu bukan karena SBKRI nya, karena saya belajar tentang politik, setahu saya ketika mendaftar pemilu bukan masalah SBKRI nya tetapi lebih karena tidak mempunyai KTP. Bahwa apakah dalam proses pembuatan KTP itu memerlukan SBKRI mestinya sudah tidak. Sepanjang keluarganya mempunyai KK disitu,

sebenarnya sudah tidak menjadi masalah, apalagi ketika dia lahir di Indonesia, mestinya gak ada masalah. Kecuali jika dia pendatang, dalam banyak hal masih banyak-banyak pertanyaan.

6. Tetapi diberita Kompas yang saya baca ada beberapa etnis Tionghoa yg tidak bisa memilih karena tidak memiliki SBKRI?

Tetapi kan lebih persolaannya karena dia tidak memiliki KTP, itu di pemilu 2004 kan. Pemilu 2004 kan, proses setelah pemerintahan Gus Dur, memang pada saat itu hal tersebut banyak terjadi, tetapi mestinya sudah tidak lagi, karena persoalan mendasar kalau terkait dengan hak pilih sebenarnya hanya KTP.

7. Apakah anda sering menulis tentang etnis Tionghoa juga ya pak?

Tidak selalu, tetapi bukan hanya tentang etnis Tionghoa saja, kalau tentang diskriminasi saya pernah menulis tentang agama jawa sunda, kan ada penganut kepercayaan, yang sebenarnya tidak diakui sehingga proses perkawinannya tidak diakui. Namun pada proses politik bisa menang, dan pada proses hukum mereka diberikan hak juga.

8. Kalau menulis mengenai etnis Tionghoa, karena memang karena ditugaskan atau karena memang tertarik?

Dalam banyak hal, memang karena terjadi persoalan-persoalan dalam masyarakat. Tidak selalu ditugaskan, tetapi ketika kita melihat persoalan-persoalan yang besar

yang terjadi dalam masyarakat kemudian kita kembangkan dan itu melibatkan banyak orang

9. Saat ini banyak etnis Tionghoa yg mulai menjadi caleg atau masuk dalam dunia politik, bagaimana pendapat anda? apakah mereka sudah benar-benar berkompeten untuk masuk dalam dunia politik?

Jujur saya tidak pernah mau mempersoalkan mau etnis Tionghoa, Jawa atau Batak sepanjang mereka berkompeten, ya harus kita akui dan toh kenyataannya banyak juga caleg-caleg dari etnis Tionghoa yang menang. Partai-partai politik yang besar di Indonesia, sampai sekarang ini masih dikuasai kalau boleh dibilang non Tionghoa. Tetapi kemudian orang-orang Tionghoa ini mampu masuk menjadi caleg dan bahkan jadi, itu artinya ada sesuatu yang lebih dan mereka bisa mengalahkan orang etnis lainnya. Sesuatu yang lebih itu bisa kemampuan mereka atau kemampuan finansial mereka, tetapi memang harus diakui dalam beberapa kasus orang Tionghoa yg muncul menjadi caleg, bahkan kemudian menjadi wakil rakyat dari kalangan etnis Tionghoa, menurut saya memang punya kemampuan, dari sisi bagaimana mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun kemudian mereka melakukan artikulasi kepentingan-kepentingan mereka secara politis. Contohnya cerita tentang Alvin Lie, yang menjadi satu-satunya Tionghoa dan satu-satunya non muslim di PAN ini menjadi menarik, apalagi dia mampu menunjukkan kapasitasnya, meskipun pada periode 2009 ini dia tidak masuk. Cerita tentang Basuki di Belitung Timur yang menjadi Bupati Belitung Timur, dan sempat menjadi calon Gubernur Bangka

Belitung, walaupun kalah, menurut saya menunjukkan betapa orang Tionghoa diakui. Walaupun saya juga tahu, ada juga etnis Tionghoa yang menjadi caleg, bahkan tidak bunyi sama sekali. Karena dia hanya betul-betul mengandalkan menyumbang partai. Cerita tentang Murdaya Poo, yg menjadi caleg dari PDI-P menurut saya tidak berbunyi sama sekali, bahkan dia mendukung presiden dari partai lain. Karena dalam pemahaman banyak orang bisa disebut juga bermuka dua atau hanya cari selamat itu menunjukkan bahwa memang banyak juga yang hanya sekedar mencari selamat.

10. Cari selamat itu sudah menjadi stereotype bagi etnis Tionghoa bahkan sejak jaman Soeharto, bagaimana menurut anda?

Memang pada masa lalu kita sering melihat kalau orang Tionghoa, apalagi pengusaha yang berkecimpung dalam dunia politik memang biasanya hanya cari selamat, dan selalu ada bayangan seperti itu. Tetapi belakangan saya lihat tidak sepenuhnya seperti itu, karena banyak juga orang-orang etnis Tionghoa yang kemudian berani menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan pemerintah, soal benar atau salah itu soal lain, tetapi paling tidak dia berani menyuarakan sesuatu terhadap pemerintah, bahkan mengkritik pemerintah seperti misalnya Kwik Kian Gie yang pernah jadi menteri juga. Atau dipemerintahan sekarang ada menteri perdagangan Maria Eka Pangestu dan dia punya sikap yg harus dihargai, toh tidak semuanya yang ada didalam pemerintahan atau di politik yg hanya cari aman. Menurut saya posisi yang menunjukkan etnis Tionghoa sudah mulai berani dan masyarakat sudah mulai menerima sama seperti etnis lain, toh orang jawa, orang Sulawesi selatan, Makassar, yang terjun ke dunia

politik hanya untuk mencari selamat ada juga kan. Artinya menurut saya ini bukan masalah Tionghoa atau tidak Tionghoa, ini lebih ke karakteristik atau tipe dari masing-masing pribadi.

11. Menurut anda bagaimanakah partisipasi politik etnis Tionghoa dari Pemilu 2004 hingga saat ini? Apakah terdapat perbedaan?

Secara kuantitatif memang tidak pernah ada penelitian yang melihat sejauh mana partisipasi etnis Tionghoa, tetapi pada tahun 2004 toh juga tidak sedikit caleg atau orang Tionghoa yang memberikan hak pilihnya. Saya kira setelah reformasi ini partisipasi mereka semakin besar bahkan semakin terbuka juga dalam banyak hal, misalnya mereka sudah banyak melakukan kampanye dalam bahasa cina. Memasang spanduk dijalan-jalan dengan menggunakan bahasa Cina, dan itu terjadi pada pemilu 2004. Kemudian pada pemilu 2009, lebih banyak juga caleg-caleg yg melakukan hal serupa. Artinya secara partisipasi menurut saya semakin besar, dan semakin terbuka juga. Semakin banyak caleg-caleg dari etnis Tionghoa, bahkan dalam pemerintahan di eksekutif juga tidak sedikit sekarang etnis Tionghoa yang menjadi bupati, walikota atau gubernur. Jadi menurut saya, sudah relatif sama dengan etnis-etnis yang lain, cuma persoalannya kemudian bagaimana dia membawa diri atau menempatkan diri, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lain. Saya baru pulang dari Kalimantan barat, meliput perayaan Cap Go Meh di Singkawang, Walikota Singkawang itu Chinese yang bernama Hasan Karma dan dia melakukan perayaan besar-besaran. Menjadi baik adalah ketika yg dia lakukan itu menjadi bagian dari

untuk mewujudkan ke-Indonesiaan. Menjadi kurang elok apabila tidak menghargai minoritas yang lain, kebetulan di sana yang menjadi minoritas adalah etnis Jawa. Saya rasa tidak hanya etnis Tionghoa tetapi etnis yang lain tetap harus mencoba untuk menghormati yang lain. Kita ini berbeda tetapi harus tetap satu, itu yang menjadi kunci.

12. Apakah terdapat aturan-aturan tertentu yang diberikan oleh Kompas ketika menulis tentang etnis Tionghoa?

Ga ada, kita tidak pernah membuat batasan, kalau mau menulis tentang Tionghoa ya tulis aja. Ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kasus diskriminasi dan anda melihat ada beberapa berita Kompas yang menyoroti hal itu, tetapi kita tidak hanya berbicara mengenai diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tetapi juga diskriminasi terhadap etnis-etnis yang lain. Perlakuan diskriminasi terhadap umat yang lain, misalnya Kristen, Katolik yang membangun Gereja juga kita soroti. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, juga mengenai penganut kepercayaan juga kita soroti. Apabila Kompas dihujat oleh etnis yang lain itu resiko. Ketika kita harus membicarakan tentang perilaku diskriminasi, tetapi ketika Tionghoa menjadi mayoritas dan dia melakukan sesuatu, orang lain juga akan berpikir mayoritas itu juga melakukan diskriminasi, seperti yang misalnya terjadi di Singkawang tadi. Tantangannya adalah bukan persoalan lu Cina ato bukan, gue Jawa ato bukan, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita lebih saling menghargai.

13. Jadi lebih merupakan stereotype ya pak?

Saya rasa bukan mengenai persoalan stereotype. Dimanapun ketika siapapun menjadi penguasa, maupun mayoritas dan kerumunannya lebih banyak disitu dia akan menekan yang kecil. Nah, itu yang kemudian mesti dijaga juga, karena begini dalam cerita yang lain juga ada suatu daerah yang mayoritas penduduknya muslim, kepala daerahnya muslim, atau pemimpinnya muslim, dia mencoba membuat misalnya Perda Syariah. Hal tersebut juga kita soroti karena dia juga harus berpikir mungkin juga di satu daerah yang lain muslim menjadi minoritas. Dan bagaimana mereka harus dihargai, saya kira juga sama dengan konteks Tionghoa. Di Kompas kita tidak pernah memberi batasan untuk menulis ga boleh ini, gak boleh itu, kalau ada diskriminasi ya ditulis, tetapi kalau misal ada diskriminasi kita mau bela ya kita bela, tapi dalam sisi yang lain kalau dia melakukan pelanggaran ya kita beritakan. Dalam kasus korupsi, ada banyak orang-orang etnis Tionghoa disitu dan kita tidak pernah menutup-nutupi.

14. Mengenai nara sumber, apakah dasar pemilihan narasumber?

Kompetensi pasti, kemudian *proximity*, kita harus berpikir mengenai kedekatan. Saya kira standar mengenai hal tersebut, yaitu berdasarkan teori jurnalistik. Apa yang dilakukan Kompas ketika memilih orang sebagai narasumber, tentu kita melihat apakah orang itu memiliki kompeten untuk berbicara, itu memiliki kedekatan dengan apa yang kita bicarakan, atau lokalitas dengan apa yang kita bicarakan. Kompas gak pernah kemudian mengklaim atau mem-*blacklist* narasumber hanya karena persolan-

persoalan etnis, sepanjang dia punya kapasitas dan dia mempunyai pengetahuan memadai dan memang dia pantas untuk bicara tentang itu, kita akan ambil.

15. Berita yang saya temukan kebanyakan mengenai seminar-seminar yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, hal tersebut apakah memang Kompas tertarik dengan seminar itu atau ada kerja sama tertentu?

Gak kerja sama, saya kira tidak hanya tentang seminar. Ya kalau seminar itu materinya menarik ya akan kita ambil, siapapun penyelenggaranya, saya kira anda harus membandingkan dengan seminar-seminar lain yang kita beritakan. Terakhir kemarin di Singkawang ada seminar tentang Cap Go Meh dalam konteks ke-Indonesiaan ya kita beritakan, tetapi toh seminar-seminar yang lain juga kita beritakan.

16. Apakah ada tekanan-tekanan dari pemerintah terhadap Kompas, ketika menulis tentang etnis Tionghoa?

Sejak reformasi, tidak pernah ada Kompas diminta untuk tidak memuat sesuatu apalagi terkait dengan etnis Tionghoa, biasanya kita saja yang melihat etnis tidak etnis berita itu diberitakan. Misalnya, tentang Artha Timur Jaya yang orang Tionghoa dengan Coel yang disebut-sebut berselingkuh, apakah Kompas beritakan? kan tidak kan? itu bukan bagiannya Kompas.

17. Diberita yang saya lihat, masih banyak kata diskriminasi dan “dianggap warga asing”, menurut Kompas bagaimana?

Mungkin kebetulan berita-berita yang anda temukan dan anda soroti adalah mengenai diskriminasi. Memang harus diakui masih ada persoalan mengenai diskriminasi misalnya terkait dengan SKBRI, secara aturan kan mestinya sudah tidak ada lagi. Saya kira mestinya sudah tidak ada diskriminasi, meskipun juga beberapa hal kritik-kritik terhadap etnis tionghoa yang mereka sendirilah masih menempatkan diri sebagai warga asing. Kenapa saya mengatakan begitu, karena dalam banyak kasus terutama kasus korupsi banyak orang-orang Tionghoa yang kabur, itu yang menjadi persoalan bagaimana masyarakat yang lain melihat orang Tionghoa. Jadi dalam konteks seperti itu, kemudian mereka menjadi *alert*, menjadi curiga, sehingga memunculkan kasus-kasus diskriminasi pada yang lain. Karena gak mungkin melakukan diskriminasi pada yang kuat-kuat ini, karena mereka bisa membeli, sederhana saja mereka bisa membelinya. Dalam beberapa cerita, orang Tionghoa menjadi mata air bagi birokrasi di negeri ini, untuk berbagai kepentingan.

18. Jadi ada kesan bahwa etnis tionghoa hanya dimanfaatkan?

Ada pemanfaatan, ada diskriminasi mungkin masih berjalan, tetapi juga ada pemanfaatan, mungkin juga dari sisi balas dendam yang salah itu juga mungkin terjadi, padahal tidak semuanya kan, banyak sekali orang Tionghoa yang tidak melakukan apa-apa, menjadi warga negara yang baik tetapi karena tidak sedikit kemudian yang muncul yang itu seperti yang sudah saya sampaikan tentang kasus-kasus korupsi dan mereka yang kabur! Kabur dengan banyak kekayaan yang dibawa artinya uang negara yang dibawa, ini kan menjadi persoalan, dan kebetulan memang

banyak kasus-kasusnya kan ini, sementara kalau orang Batak mau kaburnya ke mana? hampir ga ada, terakhir Bank Century ada keturunan asing tetapi larinya ke negeri2 yg diluar, kaburnya ke negara lain tetapi toh tetep ke singapura juga, ini kembali lagi juga Tionghoa juga, si Robert Tantular nya masuk, keluarga Tantular lainnya sudah kabur duluan.

19. Pernah mendapat ancaman?

Sepanjang ini tidak pernah mendapat ancaman, protes ya biasa, melalui pengacara ya biasa

20. Bagaimana Kompas menanggapi protes-protes tersebut?

Prinsip dasar jurnalistik kan kebenaran, sepanjang kita meyakini itu kebenaran, dan jurnalistik itu bertanggung jawab kepada publik bukan kepada pemegang modal, sepanjang kita bertanggung jawab kepada publik bahwa apa yang kita sampaikan bukan “dibeli” yah hadapin saja, ya kita jelaskan donk, kalau mau protes ya ajuin, kalau keberatan dengan keterangan siapa, itu ya sampaikan saja di pengadilan.

21. Salah satu pendiri Kompas kan Tionghoa, berpengaruh kah?

Sejak awal pendiri Kompas kan ada Tionghoa, ada Jawa, Kalimantan, ada orang-orang Katolik,. Sejak awal mereka berpikir tentang ke-Indonesiaan, relatif si ga ada masalah, apakah harus Tionghoa Katolik atau yang lain baru bisa masuk Kompas ya ga, ada Floresnya juga dan disini sudah biasa sekali, kami merasa disini ga pernah ada geng cina, geng jawa, tetapi kembali lagi ya memang orang jawa lebih nyaman

ngumpulnya sama orang jawa mungkin karena kesamaan bahasa, kesamaan selera makan, ngomong jawa kan lebih cair daripada ngomong pakai bahasa Indonesia, saya kira sama juga yang terjadi pada etnis Tionghoa, bahkan sama-sama Tionghoa pun bisa ga ketemu, kalo ada yang cina kek, mandarin dan hokkian, ga nyambung juga bahasanya, yah mungkin hanya karena itu.

22. Lebih ke latar belakang budayanya yah?

Iya, sama-sama cina kek. Tapi yang satu cina kek Singkawang, yang satu cina kek Bangka Belitung, ya gak nyambung to. Jadi persoalannya bukan persoalan rasial. Kalau di Kompas kita sudah mencair.

23. Berita tentang partisipasi politik etnis Tionghoa yang saya dapatkan lebih banyak ditahun 2004, dan di 2009 mulai berkurang, kenapa?

Mulai berkurang ya karena di tahun 2004 itu ada transisi proses tahun 1998 kebawah atau pada jaman Orba, Chinese kan tidak begitu leluasa. Begitu Gus Dur naik kan menjadi lebih leluasa, paska pemerintahan Gus Dur ketika semua aspek-aspek itu dibuka terjadi pemilunya di 2004 kan, jadi kelihatan bagaimana partisipasi mereka. Tahun 2009 saya kira “sudah normal”, kita tidak pernah lagi membicarakan suku-suku yang jelas ya Basuki maju, maju saja dan yang lain-lain maju, ya maju saja.

24. Sudah tidak menjadi istimewa lagi ya?

Ya betul.

25. Ketika anda menulis, selain dari data narasumber apakah mengambil referensi dari media lain juga?

Kadang kala iya, kadang kala kita ngambil juga dari buku. Kalau media lain hanya sekedar sebagai bacaan tapi bukan referensi. Tapi biasanya kita ngambil dari buku-buku, dan Kompas kan punya Litbang. Penelitian-penelitian itu yang kita gunakan sebagai referensi, bahkan menjadi temuan dari berita atau tulisan yang kita lakukan. Kembali lagi di 2009 kita tidak pernah mempersoalkan seberapa banyak partisipasi etnis Tionghoa karena kemudian sudah menjadi hal yang biasa.

26. Ketika menulis lebih karena tertarik atau karena ditugaskan?

Ya kalau itu si kita berangkatnya dari ketertarikan ya. Kalau sumber penulisan ada 4 kan. Kalau kita berbicara dari mana si sumber berita, yang pertama penugasan, editor memberi tugas kepada wartawan. Kedua perencanaan, artinya baik editornya membuat perencanaan lalu menugaskan wartawannya, dan wartawannya bisa merencanakan sendiri kan. Yang ketiga agenda, dari seminar-seminar, kalau ga ada seminar-seminar atau acara ya melalui perencanaan atau penugasan. Penugasan itu kan dari atasan dari ke bawahan, dari editor ke wartawannya. Keempat, adalah berita itu jatuh dari langit. Ya kayak pesawat jatuh, kita gak pernah bisa merencanakan, kita ga pernah bisa mengagendakan-nya. Besok ada pesawat jatuh kan ga mungkin, kecelakaan, penangkapan teroris, ya semacam itu. Jadi, ya bisa saja kalau soal Tionghoa tadi bisa jadi wartawannya membuat dari perencanaan dia, dia bikin ide atau dari agenda, tapi kan biasanya gak cukup dalam sehari kan, berikutnya bisa

dikembangkan dengan penugasan, bisa dengan perencanaan. Jadi agak susah apabila menjadi patokan apakah penugasan atau ketertarikan. Bisa jadi ya antara penugasan, perencanaan, dan agenda.

27. Ketika anda menulis apakah anda juga menempatkan diri sebagai pembaca?

Teorinya harus, harus menempatkan diri sebagai pembaca. Karena kemudian kalau tidak kita tidak pernah tahu, apakah orang lain tahu apa yang kita tulis. Dalam teorinya memang setiap kali wartawan selesai menulis berita, maka dia harus membacanya apakah dia tahu berita yang dia tulis. Kita selalu menempatkan diri sebagai pembaca. Kan bukan apa yang kita mau, tetapi dengan asumsi apa yang dibutuhkan pembaca lah yang kita tulis.

28. Apakah juga mempertimbangkan reaksi-reaksi yang muncul dari pembaca?

Tentu, setiap kali sebuah berita yang baik. Kita selalu mempertimbangkan reaksi-reaksi yang muncul itu apa. Jadi selalu membayangkan itu, karena itu teori jurnalistik. Dalam teori penulisan berita, kalau dulu kan *hardnews* kan 5 W+ 1 H, sekarang itu gak cukup lagi, sekarang itu dah tambah SW kan (*so what*). Kalau sekedar memberitakan apa, siapa, kapan, bagaimana dan mengapa itu kan bagiannya dari Online atau media elektronik, yang kilat-kilatlah. Tapi kalau di media cetak, sekecil apapun kita akan memberitakan *so what* bahkan mungkin *what next*. Jadi pasti kita mempertimbangkan reaksi pembaca.

29. Di Kompas apakah ada rapat redaksi, tiap hari apa dan berapa kali?

Di Kompas kita punya tiap hari ada 3 kali rapat. Yang pertama rapat sore di desk, itu menyiapkan apa saja sih berita-berita yang akan diturunkan besok di masing-masing desk. Itu juga laporan-laporan dari wartawan, apa yang dia dapatkan hari ini. Terus habis itu ada rapat, kita menyebutnya rapat tengah adalah rapat editor yang dari desk-desk yang membicarakan apa yang mau diputuskan di halaman 1, halaman 15 dan kemudian desk-desk juga melaporkan apa yang akan menjadi *headline*-nya mereka, ya semacam itu lah. Rapat yang ketiga itu biasanya setiap pagi, jam 09.30 Wib itu rapat pagi, dan biasanya hanya editor-editor, KaDesk, dan Wakadesk, Pemred, redaktur pelaksana, dan kadang-kadang Pak Jacob juga hadir. Kita membicarakan tentang koran yang kita terbitkan hari ini, isinya kaya apa, kurangnya apa kalau memang masih kurang, kemudian apa yang akan dilakukan lagi untuk diterbitkan besoknya. Itu dilaksanakan setiap hari, kecuali sabtu sama minggu. Tetapi kalau minggu masih dilaksanakan rapat sore. Itu setiap hari dilakukan, di rapat desk juga membicarakan besok mau ngapain lagi ya, besok apa yang mau dilanjutin, tapi dalam skala desk. Ada rapat desk politik hukum, metropolitan, nusantara. Kecuali desk nusantara yang melakukan rapat dengan pasukan2nya di daerah. Rapat tengah, besok pagi rapat jam 09.30, jadi ada kesinambungan apa yg dimuat hari ini dengan besok, kalau harus dibuat besok ya dibuat, kalau harus dihentikan ya dihentikan. Misal, kalau mengkritik pemerintah secara terus-terusan selama 4 hari, besoknya ga usah dulu lah.

30. Apakah semua wartawan harus hadir?

Kalau dalam rapat desk iya, wartawan terlibat, kalau yang rapat yang tengah kadesk, wakadesk, redpel, pemred, dan terus membagi tugas, ada dalam konteks itu kadang-kadang misal kita di desk mutusin sesuatu ttp ditengah bilang ga deh, itu ga usah, itu harus diganti leadnya biar lbh menarik, dalam rapat desk juga wartawan kalau mau ngusulin di halaman satu tapi editor bisa mutusin ga itu di headline desk kita aja dan di tambah-tambahin apa lagi

Rapat desk sekitar jam 15.30 WIB, Rapat tengah 16.00 WIB yang menentukan halaman satu yang mana, kalau masih ada yang kurang apa yang mau dikerjakan besok, kalau mau ada *continues news* ya kita tentuin disitu,

31. Ketika menulis berita biasanya apa yg lebih dahulu diputuskan, apakah angle berita, wartawannya atau bentuk beritanya?

Pada saat rapat desk, itu kita bicarakan, bisa jadi angle nya yg kita bicarakan, atau bisa jadi wartawannya ya sudah jalan aja, toh mereka sudah tahu, toh level wartawan di Kompas wartawan-wartawan madya, apalagi di desk politik hukum, level wartawannya itu level wartawan madya. Jadi mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan.

32. Apakah ada instruksi khusus terhadap wartawan ketika mereka ditugaskan untuk meliput berita?

Tentu saja ada, kan penugasan. Biasanya selain *budgeting* kita menanyakan ada sisi yang “ini” gak. Klo wartawannya bilang ada ya sudah wartawannya jalan aja, klo ga ada “tolong dong perdalam yg itu”. Contohnya salah satu wartawan barusan meng-

sms saya, “besok pengawas minta KPU pakai DPT pilpres dan DPT pilkada”, kalau saya melihat udahlah gak usah diliput ya bisa aja, tapi kalau mau dikembangkan saya bisa bales dia untuk mempertajam sesuatu.

33. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik dilapangan, wartawan itu selalu menghubungi bapak, dan bapak yang memutuskan apakah akan diliput atau tidak?

Gak selalu juga, toh kadang-kadang mereka sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan. Kadang-kadang mereka hanya memberi tahu apa yang mereka liput.

34. Ada pakem tertentu?

Saya kira sama, semua media sama. Tetapi yang membedakan satu media dengan media yang lain, adalah kematangan dari setiap wartawan, dan kematangan dari media itu. Itu yang pertama, yang kedua visi misi media itu. Yang ketiga, kepentingan media itu. Karena itu selalu diingatkan sebaiknya media itu selalu independent, tetapi tidak semua media independent. Kita ga bisa bicara tentang independensi, misalnya membandingkan Kompas dengan Suara Karya, yang jelas merupakan korannya Golkar. Kan independensinya langsung beda. Kompas tidak memiliki afiliasi politik dengan siapapun, atau yang paling kontras membandingkan, Jurnal Nasional dengan Suara Karya. Jurnas punya nya pak SBY, Suara Karya punya Golkar, dalam kasus Century pasti diameternya berhadapan. Kompas tidak punya kepentingan apa-apa, gak punya afiliasi politik, dan pimpinan-pimpinan Kompas juga

tidak terlibat dengan hal-hal semacam itu, bahkan kami punya *policy*, ketika saya misalnya menjadi anggota parpol A, hari ini juga saya harus mundur dari Kompas.

35. Jadi lebih menekankan pada kenetralitasan?

Netralitas itu menjadi penting, jadi jurnalistik kan berbicara tentang kebenaran. Kita berbicara tentang pertanggung jawaban kita terhadap publik bukan pada pemegang modal. Kita bandingkan dengan kasus Century, antara Kompas dengan Tempo. Mungkin orang-orang Tempo akan menganggap orang-orang Kompas tidak sepaham dengan mereka, dalam konteks ini Tempo dalam “membela” Boediono dan Sri Mulyani. Tapi apakah Kompas salah, saya kira juga tidak karena Kompas tidak menjadi anggota tim nya Boediono dan Sri Mulyani, tapi Kompas juga bukan anggotanya yang kontra Century kan. Disisi lain kita melihat dalam kasus Boediono, Gunawan Muhamad sebagai pimpinan Tempo adalah timnya pak Boediono. Kami agak bersyukur di Kompas, karena para pimpinan Kompas tahu betul mana posisi yang harus ditempati, sehingga kami tidak pernah harus khawatir berita yang kami tulis bersinggungan dengan kepentingan pimpinan, karena pimpinannya lepas semua, independent semua, tidak pernah terlibat dalam tim-tim tertentu.

36. Mengenai *placement*, apakah yg menjadi dasar klarifikasi beritanya, apakah berita tersebut ditempatkan di rubrik mana?

Masing-masing desk kan punya halaman, desk politik hukum punya halaman 2,3,4,5, tetapi kemudian setiap kali berita itu lebih kuat, lebih bagus, atau lebih besar dan punya dampak lebih luas lagi tentu kita akan mengusulkan ke halaman 1 dan disitu

kemudian akan terjadi pertarungan karena desk-desk lain juga akan mempunyai pemikiran yang sama untuk menempatkan di halaman 1 atau di halaman 15. Ya kita biasanya *fight* aja mana yang lebih besar.

37. Kemudian siapa yg memutuskan?

Di rapat biasanya ada redaktur pelaksana dan ada pemred, mereka ikut terlibat, ikut mengarahkan, bahkan ikut berdebat. Rubrikasi kan sudah kita buat, kalau di politik hukum kita punya rubrik missal pemikiran, itu kan wawancara dengan orang-orang tertentu. Kita harus menyiapkan, seperti hari ini (9 Maret 2010) kita punya rubrik Sisi Lain Istana, ya itu sudah kita persiapkan sebelumnya.

38. Peranan editor? Apakah hanya teknis atau sampai pada konten?

Ya semuanya, kalau teknis kan hanya menentukan panjang pendeknya berita, kalau tulisan itu panjang pasti dimuat ya tidak juga. Lebih kepada kontennya dibanding teknis . Karena kontennya kadang-kadang berita yang panjang kita potong menjadi kilasan, ya semacam itu. Editor menentukan teknis ya iya, karena halaman kita kan terbatas, harus dibagi dengan iklan. Jadi, lebih kepada konten, konten pun tidak bisa berpanjang-panjang karena jelas terbatas pada *space*.

39. Bagaimana menurut Kompas partisipasi politik etnis tiong hoa pada pemilu 2004 dan 2009?

Saya melihat ga ada bedanya, dengan yang lain kita sudah Indonesia. Jadi udah gak menjadi masalah.

40. Presentasi pegawai etnis Tionghoa?

Kita gak punya itu dan kita gak mau ngitung itu. Memang ada perusahaan-perusahaan yang membedakan gaji bagi etnis Tionghoa dan bukan etnis Tionghoa. Tapi di Kompas penerimaan pegawai berdasarkan kemampuannya, bukan masalah dia Cina, di Batak, dan penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan kita. Di perusahaan Batak jg terjadi hal seperti itu, tapi saya bersyukur di Kompas tidak terjadi hal itu. Karena sejak awal dari lingkungan saya juga tidak pernah membeda-bedakan apakah saya Katolik atau Cina.

B. Imam prihadiyoko

Tanggal wawancara : 24 April 2010

Biodata

Nama : Imam prihadiyoko

Tanggal lahir : 17 desember 1972

Jabatan : Sub editor desk metropolitan

1. Apakah anda etnis tionghoa?

Campuran, eyang saya ada Chinanya, tapi secara umum orang Jawa

2. Banyak bergaul dan sering bergaul dengan tionghoa?

Oh, banyak sekali..iya

3. Bagaimana pendapat tentang orang tionghoa?

Biasa aja, seperti pada umumnya orang-orang

4. Eksklusif kah?

Ohh..ada lah beberapa yang eksklusif, ada yang tidak, tapi kan sama saja,tapi orang jawa kan juga eksklusif

5. Ada stereotipe mereka hanya mau bergaul dengan sesamanya, bagaimana pendapat anda?

Kalau pengalaman si sebagian besar si tidak ya, meskipun ada juga yang begitu

6. Caleg dari orang China, bagaimana pendapat anda? apakah mereka memang sudah berkompeten? streotypenya kan karena mereka punya duit

Kalau soal punya duit kan yang lain juga punya duit. Cuma kan memang kalau setelah paska reformasi kan jabatan-jabatan politik itu terbuka ya untuk keturunan-keturunan China itu. Artinya mereka sudah tidak ada batasan lagi untuk itu kan sebetulnya, meskipun ada beberapa dari mereka yang kadang-kadang secara umum menganggap politik itu ... bukan karena Chinanya tapi karena umum.

7. Tentang diskriminasi, bagaimana pendapat anda?

Tidak ada kalau menurut saya, tidak ada diskriminasi kalau dalam politik ya, buktinya banyak yang masuk tuh, di PAN ada Alvin Lie kan, di PDIP banyak, di Demokrat lebih banyak lagi di Golkar juga ada ya, tidak ada ya, kalau menurutku ya tidak ada, kecuali orang yang ingin masuk politik karena ingin politik bukan karena ada diskriminasi, tapi sekarang paska reformasi sudah tidak melihat lagi ya, tidak melihat lagi ada diskriminasi.

8. Beritanya tentang diskriminasi SBKRI?

Ohh, sudah tidak ada lagi itu sekarang, itu kan sudah dicabut, itu kan tahun 2003, 2004 sekarang apalagi itu sudah tidak ada lagi. Sebetulnya kan itu peraturan sejak Orde Baru tuh, ya tidak hanya itu yang diskriminasi tapi kan sekarang sudah dirubah semua, sudah tidak ada lagi, dulu misalnya peraturan tentang tahanan politik ada tulisan ET di KTP-nya (eks tahanan politik), sekarang kan sudah tidak ada lagi ET. Apalagi Gus Dur naik jadi presiden, kan semuanya boleh, dagang kue bolen boleh, barongsai boleh.

9. Tapi prakteknya sampai sekarang masih ada, bagaimana pendapat mas?

Iya karena kan mencabut peraturan itu kita memberitakan agar apa...kadang-kadang pemerintah itu lupa bahwa itu masih ada, diskriminasi, bukan karena ingin memberlakukan tetapi karena tidak tahu, tidak ngeh..begitu tahu ketika ada orang mengurus kan surat, ooh ternyata ada, prinsipnya si sudah tidak ada

10. Tetapi masih saja ditanyakan?

Itu karena mereka tidak tahu aja, orang Chinanya sendiri yang tidak tahu kan, kalau sudah tidak perlu itu, itukan soal sosialisasi saja, sama kaya undang-undang dasar sekarang,kamu tahu tidak, berapa kali amandemen?

Aduh enggak tahu mas.

Nah kan tidak tahu kan, ini yang terpelajar lho. Apalagi mereka yang tidak terpelajar, yang ga urus2an kaya gitu. Ditipu aja mereka itu..wah mo ngurus itu, mintain duit, bukan soal diskriminasi.

11. Jatuh nya jadi kaya seperti diskriminasi ya, mas?

Iya, padahal penipuan, delik aduannya delik penipuan, karena ga tahu ya.

Sekarang misal kalau ngurus apa, emmmmm makan, kamu lihat struknya ada pajak.

12. Oooo,yang PPN 10% tu ya mas?

Iya, PPN 10% padahal per 1 April ssudah di cabut kan, dan tidak banyak yang tahu kan, tapi restoran masih ngambil kan, artinya kan itu penipuan saja. Secara negara sudah tidak memungut, tetapi orang-orangnya masih memungut. Sama seperti ini orang-orang, secara negara sudah tidak ada lagi, tetapi secara praktek orang-orang ini ditekan, misal mau menngurus ini tidak? Oyayayaya, kamu yang urus saja, kasih saja, pusing-pusing amat, kamu saja yang ngurus KTP sapa yang mengurus? urus sendiri apa bayar orang? Ayo jujur diurus sendiri apa bayar orang?

He'eh, iya.

Sim?diurus di calo apa urus sendiri?

Lebih milih gampangnya mas.

ha iya kan, sama seperti ini

13. Kalau menulis biasanya karena penugasan atau karena tertarik?

Ya karena ada problemnya, jadi waktu itu kan memang ada orang ketika sedang mengurus SKBRI, eh SBKRI, tapi ketika mengurus padahal sudah tidak perlu lagi, oh ternyata masih ada padahal sekarang sudah reformasi, nah itu jadi problem, jadi polemik.

14. Apakah ada pengalaman pribadi atau melihat hal tersebut?

Ya bisa aja, ya waktu itu kan ada temen mengurus, oh ini kan tidak bener, ya sudah kita bikin, kita liat problemnya, itu bukan karena Chinanya karena masalahnya, kalau kita melihat masalah dari mana aja kan, ,

15. Ohh..iya..iya..karena masalah SBKRInya itu ya mas?

Iya, bukan karena korps, oh ini karena ini orang China terus kita membela kelompok China, tidak ada itu

16. Ketika melihat suatu problem, mas kan nyari berita sendiri ya mas ya?

Ehmm iya

17. Terus nanti di rapatin mas?misal saya punya berita kaya ini, atau bagaimana mas?

Ya iya, ada prosedurnya kan kalau di *Kompas*, tiap sore ada rapat, rapat wartawan, kalau dulu itu jam 5 kalau sekarang jam 3, terus nanti ada berita ini nanti deal, di budget, budget berita, terus di budget di rapat editor

Ohh gitu

18. Biasanya ada berita tentang apa atau ada peristiwa tentang apa terus rapat ya mas?atau bisa juga sebaliknya?

tidak, ya bisa bolak balik, bisa dari hasil rapat ada yang menarik terus kita liput atau ada hal yang menarik di lapangan ya kita liput.

19. Partisipasi politik etnis tionghoa tahun 2004, menurut mas bagaimana?

Tahun 2004, tahun 2004 kan ada banyak partai, kan ada partai Tionghoa, PITI, tahun 2004 kan ada dua partai ya kalau tidak salah ya, Partai Tionghoa sama..eee..aa ada lagi, eh bukan partai, tadinya mau bikin partai tapi tidak layak, tidak memenuhi syarat, partai apa itu ya...partai islam Indonesia, PITI.eh PITI itu partai Islam Tionghoa Indonesia ada lagi partai Tionghoa Indonesia, ada dua partai itu kalau tidak salah

20. Berarti dari 2004 dah mulai ya mas?

Wahh dari 99

21. Terus kalau tahun 2009 kemarin secara umum menurut pandangan pribadi bagaimana mas?

Ohhh..masih ada, lebih banyak, lebih aktif, banyak yang ikut, tidak hanya duit, yang kampanye..yang itu..kan makin banyak itu, ada bupati, ada camat, 2009 kan lebih banyak lagi kan yang ikut

22. Ada aturan atau batasan sendiri tidak mas dari *Kompas* dalam menulis sesuatu, dalam konteks ini tentang etnis Tionghoa ya mas?

Selama ini belum ya

23. Misal, tidak boleh menulis apa gitu?

Ohh tidak ada, semua prinsipinya boleh, sekarang ini semuanya boleh, kecuali yang dilarang..hahahaha...tinggal caranya aja, tidak ada batasan, semua boleh, biasanya yang dihindari misalnya ada berita tentang pemerkosaan lalu kita ceritakan detail bagaimana ada penis dan vagina kan tidak mungkin begitu kita nulisnya, itu jadi cerita stensilan, kalau begitu kan..atau misalnya ada cerita...ini korban, korban luka dengan luka menganga dengan sadis.....itu tidak, itu bukan gayanya *Kompas* lah

24. Berarti ada *Kompas* punya pakem sendiri ya mas dalam pemberitaannya?

Ya iya, sebenarnya ikuti itu saja, kode etik jurnalistik, tidak menayangkan sadis, tidak menayangkan porno, tidak menyudutkan etnis apapun, bahkan tidak menyudutkan agama apa pun

25. Tulisan ini kan membicarakan tentang Tionghoa yang selama hanya cari aman, menurut anda bagaimana? Apa maksudnya cari aman?apakah mas menganggap bahwa stereotype itu benar?Cuma mau cari aman, terutama dalam dunia politik ya mas

Dulu, kalau zaman Orde Baru iya, tapi kalau sekarang setelah reformasi sudah tidak ada lagi, mulai 1999 sampai sekarang, sekarang itu makin terbuka saja, ada yang terang-terangan kan, ada yang bisa terang-terangan ngocok-ngocok negara dengan terang-terangan ya santai aja, mau tahu contohnya siapa?

26. Siapa mas?

Anggodo tuh..hah..anggodo sudah ngocok negara, negara segala macam dimainkan diam aja kan...cuek aja kan dan banyak yang membela dia kan?polisi pun bela dia kan...coba bayangkan, pengadilan negara bela dia kan...hahahahaha

27. Flashback ya kita ya mas, diskriminasi sekarang tuh menurut mas disebabkan karena apa mas?apakah karena mereka yang mengeksklusifkan diri jadi ada diskriminasi atau bagaimana mas?

Kalau yang dulu itu kan aturan, karena ada aturan kesepakatan dari pemerintah, misalnya tidak boleh merayakan imlek, kong hu chu tidak di akui sebagai agama, barongsai, menonjolkan etnis tionghoanya, itu mulai tahun 60an itu, tahun 68 itu, dari sejarahnya si disana, jauh lagi sejak zaman belanda, sudah di bedakan tuh, warga Negara Indonesia asli, inlander, orang asing, belanda dan orang eropa lainnya dan orang China, China sebagai perantara kan..

28. Di *Kompas*, kalau memilih narasumber itu berdasarkan apa mas? Pernah misalnya karena masalah etnis jadi tidak dipilih?

tidak ada, yang dipilih kan kompetensinya kan, jadi misal politik, pakar islam siapa, ya kita hubungi, misalnya si siapa...pakar tentang agama Kristen siapa, misalnya Romo Mangun dulu, pakar otonomi daerah siapa...ya itu dilihat kepakaran..tidak terbatas etnis, agama, itu tidak dilihat, kecuali memang ada problem.

29. Itu bagaimana mas?

Misalnya ada masalah tentang Madura, siapa tokoh Madura, ambil tokoh Madura, ada problem tentang Papua kita ambil tokoh Papua, Aceh..siapa yang pegang Aceh, ada problem tentang China, siapa tokoh China, nah itu, tapi bukan karena etnisnya itu, itu ga pernah dilihat, yang diliat kompetensinya

30. Berarti juga dilihat *proximity*- nya ya mas, kedekatan?

Maksudnya?

Ya itu, kalau ada masalah tentang Madura ya yang dicari orang Madura

Ya iya...

31. Pernah tidak si mas mendapat ancaman ketika menuliskan isu-isu sensitive?

Maksudnya?

32. Pernah tidak mas ada yang protes, tidak terima atau mengancam pas anda menuliskan sesuatu?

Kalau ak tidak pernah..

Tidak pernah ya mas ya?

tidak pernah sampai hari ini, kalau di telepon habis nulis, paling di telepon ya pernah

33. Terus bagaimana menanggapiya mas?

Ya...misal nulis tentang SBY, si Andi Malaranggeng telepon..”wahh...jangan nulis begitu lah..blablabla..kawan”

34. Lalu bagaimana mas?

Ya biasa aja, tetap saya tulis aja

35. tidak takut mas?

Ya tidak, bukan ancaman kan? tidak ngancam kan...kecuali misalnya ada yang telepon “jangan nulis itu lagi, kalau ga saya bunuh kamu” nah itu tidak pernah...

36. Ada perlindungan sendiri ya mas dari *Kompas*?

Ya ada, di *Kompas* kan ada tim pengacara, kalau memang ada kasus ya

37. Jadi tidak ada “ketakutan” untuk menuliskan tentang berita apa pun ya mas?terutama isu-isu yang sensitive

tidak, ketakutan tu misal gini kalau kita nulis salah, nah itu kita takut.

38. Maksudnya mas?

Ya kita jangan sampai nulis salah..hahahahaha..misalnya kita nulis berita misalnya SBY mati nah itu, salah kan itu, di marahin orang kan kita..hahahahaha..atau nulis tentang perkosaan, tulisannya detail kaya stensilan..paling di ejek orang...hahahaha

39. Menurut mas Agung, wartawan *Kompas* itu wartawan madya, bener tidak mas?dimana wartawan-wartawan *Kompas* tahu apa yang harus ditulis dan apa yang tidak ditulis

Ohh iya, Dari awal ya pasti tahu karena kan pendidikannya di *Kompas* kan pendidikan wartawan itu setahun

Ohh pendidikannya setahun?

Iya setahun, 6 bulan diklat, kemudian turun dilapangan 3 bulan kemudian di setiap desk masuk lagi 3 bulan kemudian setelah itu diangkat atau tidak.

40. Ada intruksi-intruksi khusus ga mas ketika wartawan meliput sesuatu?

Ya biasanya kan ini aja, aku kan editor juga, misalnya ngeliput kerusuhan Koja kemarin, kamu ambil wakil dari satapiol PP, wakil dari Polisi, wakil dari kapal pelayaran, Pelindo 2, wakil dari keluarga makam, terus stakeholder lainnya, ya itu intruksi itu, ya misal kita kasih tahu juga, hati-hati, jangan sembrono, boleh ngambil tapi hati-hati, inget nyawa juga kan, kalau tidak kan ya kena timpuk kan, kena apa, wartawan itu kan harus berani tetapi tetap ada perhitungan, kalau dia mati siapa yang rugi ga ada “saksi”, kan wartawan itu “penyaksi”, kalau dia mati yang ada emosi...hahahahaha....

41. Ada di berita *Kompas* yang tentang mereka masih dianggap warga asing, maksudnya orang China di Indonesia, menurut pendapat mas pribadi bagaimana?

Oleh?

Pemerintah, masyarakat, dengan pernah adanya peraturan SBKRI itu kan mereka seperti masih di anggap warga asing.

Wah sudah tidak ada lagi itu, sudah tidak ada lagi dikriminasi itu. Semua orang bisa pergi.

42. Tetapi masih ditanyakan lho mas tentang SBKRI, kebetulan kan juga saya orang China, ketika mw ngurus passport juga masih dtanyakan?

Ya itukan pasti karena ini, orang-orang itu cari duit saja, mana sini biar saya yang ngurusin begini-begini ntar nambah lagi... ya itu kan karena orang pengen nyari celah, biasa.

43. Dalam menentukan kelayakan sebuah berita yang akan dipublish itu biasanya apa saja ya mas, teknis konten atau apa?

Ya semuanya, ada teknis ada konten, misalnya proximity, kedekatan atau keluasan berita, kalau misal berita nasional, berita politik, artinya ap berita politik yang sedang tren hari ini. bisa juga kita rancang misalnya apa yang sudah dilakukan SBY selama 2 tahun ini, masa cuma rapat2 doang yak itu nanti dicari buktinya apa, apa yang dilakukan SBY.

44. Kalau dalam peliputan itu, apa dulu yang ditentukan, apakah wartawan peliputnya, angle berita, atau bentuk beritanya, misal feuture?

Bisa dari mana aja nantikan kita ngga tahu dilapangan dari mana, kecuali kan kalo analisis ya, kan bisa berita, soft news, hard news, atau analisis kan. Kalau hard news, apa yang ada langsung diambil, yang penting 5W+1H. kalau yang lebih soft news, feuture itu tergantung kontennya. Semua berita bisa dbikin hard news, bisa dibikin soft news, tergantung bahan sama ceritanya, misalnya begini hari ini ada kebakaran, yang pertama dibikin adalah pasti berita kebakarannya, hard news dulu, setelah itu biasanya follow up kalau misal bencana hebat, atau kebakaran besar bisa difollow up misalnya dengan feuture, kita cari korban yang paling miris, misalnya yang paling.....humanya dari sisi2 human nya, dari sisi manusianya. Misalnya ada anak

kecil orang tuanya ud ga ada, dan rumahnya kebakaran, nah itu kan tragis kan. Atau dia mw tinggal dimana sekarang, sementara pemerintah gak memberikan bantuan, keluarga ga ada.

45. Berarti tidak saklek ya, mas. Menentukan apanya dulu, semua tergantung lapangan ya?

Tergantung lapangan, tergantung jenisnya, misalnya semua itu bisa dibikin dari hardnews, softnews, feuture, atau analisis, semua itu bisa dibikin. Misal pertemuan SBY ditampak siring kemaren, SBY mengeluarkan instruksi bla2...., itu kan hard news, kalau soft news nya bisa dbikin misal nulisnya dalam pertemuan selama seminggu ini SBY memberikan ini dengan santai dengan wajah yang ceria bertemu dengan menteri dan saling menyapa bla2. Becanda guyon, itu kan jadi feuture kan. Kalau mw dbikin analisis, nulisnya keputusan SBY bla2 dengan biaya berapa trilyun, itu kan ga mungkin, baru kita analisis dengan nyari pakar.

46. Biasanya siapa yang nentuin mas, harus dibikin apa, editornya atau otoritas wartawan?

Editornya atau bisa juga dari wartawan, misal wartawan bilang “mas, ini lebih enak kalau dbikin feuture deh”. Ya, oke tapi kalau wartwan bilang ini lebih enak kalau dbikin hard news, misal kalau kebakaran, “aku bikin hard newsnya dulu, soft newsnya besok nyusul”. Setelah soft news, misal “Ini kebakaran ud 10 kali, bikin analisis”.

47. Berarti selalu ada follow up ya, mas?

Iy, follow up terus. Yakan kalau berita kalau cuma sekali, tidak ada efek nya. Misalnya kaya kasus Koja, kalau straight news, kan ada kerusuhan ini dengan korban sekian2 sudah selesai. Kalau dilanjut kita bkin feuture ini ada korban dari sat pol PP, kuk bisa, ya kita bikin analisisnya. Kenapa bisa terjadi, bagaimna polisi, bagaimana tentara, kok diam aja begini-begini, nah gitu. Dimana peran gubernur, nah kan jadi analisis to. Bisa aja pada saat yang sama, pada hari yang sama turun ketiga-tiga nya. Ada straight news, ada feuture, ada analisisnya, bisa juga.

48. Berarti editor juga menentukan hal tersebut ya?

Iya kita sama2, wartawan ngomong begini trus kita ngomong wah ini dibikin feuture nya bagus juga ni. Ya pokoknya saling informasi saja, tidak harus saklek "lu mesti bikin feuture!" tidak gitu. Kalau disini ya, kalau di *Kompas*, yang lain mungkin ada ya yang saklek.

49. Tentang placement, kan memang sudah terbagi ya, ada rubrik-rubrik sendiri.

Tapi siapa yang menentukan headline nya, atau itu harus masuk rubrik apa?

Itu kan biasanya di rapat desk. Jadi di rapat desk itu misalnya rapat desk politik, metro, itukan ada rapat, nah dari rapat itu. Ini siapa ni berita dari wartawan itu biasanya kan dirapat itu menentukan, misalnya berita ini ni, ini kuat untuk HL, ini ni berita ini ni yang lebih kuat, alesanya apa? Ooo, begini-begini...nanti editor kita liat, wah kayanya bagus ini ni, yang ini lebih kuat ya sudah ambil HL.

50. Biasanya kalau rapat redaksi itu dilakukan dalam suasana yang serius apa santai?

Santai, semua bisa mengungkapkan tapi ada isinya, biasanya rapatnya bercanda2 tapi isinya kan serius. Setiap wartawan ditanyai kamu ada ap, oh ada seperti ini, ya semuanya. Begitu juga rapat editor, untuk nentuin HL halaman 1 sama halaman 15. Halaman 1 tu apa dari setiap desk ngusulin, siapa yang kuat, nanti bertarung didalam rapat itu.

51. Pendirinya *Kompas* kan juga China, itu berpengaruh tidak dalam penulisan berita di *Kompas*? terutama tentang etnis tiong hoa itu, ada pengaruhnya tidak si mas?

tidak ada

52. Contohnya kaya media Indonesia yang punya kan siapa dan tulisannya harus gmana? secara ga langsung tulisannya cenderung membela pemiliknya.

Ya kalau disini si tidak, kalau misalnya pak Ojong, kita bela-belain China. Trus kalau China nya itu penjahat gimana, kaya Anggodo penjahat gitu, apa kita bela kan tidak.

53. Tentang foto, kalau berita itu ada fotonya atau visual image apa sish yang yang dpertimbangkan dalam pemilihan foto atau visual image?

Foto kan biasanya, misalnya ada berita tentang Koja, ya ada foto Kojanya juga kan. Bisa juga foto lepas, tidak ada berita tergantung halamanya. Misalnya hari ini ga ada berita tentang bus way, tapi kemaren pas hari Kartini ada foto pengemudi busway yang pke kebaya, itu kita sebut sebagai foto lepas.

54. Tentang judul itu biasanya otoritas wartawan sendiri atau keputusan dari redaksinya?

Seiap wartawan pasti pasti punya ide, tapi nanti dilihat aja sama editor. Editor kan melihat kecocokan judul dengan isi beritanya kan, misal kalau ga cocok ya drubah, biasanya ngrubah tidak dramatis ya. Kalau Koran kan karena keterbatasan space itu ya. Iya jadikan judul itu harus singkat kan, ga bisa panjang-panjang. Misalnya Korban Priok menjadi 200 orang, menjadi dirubah aj Korban Priok jadi 200, men-nya ilang, orangnya ilang. Itu soal teknis itu. Editor bisa merubah itu, bukan hanya editor nanti juga ada tim bahasa, misalnya ini bahasa jawa harus cetak miring, atau bahasa asing yang sudah di Indonesiakan dan masih kita cetak miring nanti dirubah yaitu terakhir, ya soal bahasanya.

55. *Kompas* dalam setiap pemberitaan selalu memberikan cover both side ga mas?

Dalam konteks ini kan antara tiong hoa dan pemerintah.

Sekarang itu bukan hanya cover both side, tapi cover all side. Jadi misalnya gini, kasus Koja. Kalau cover both side, Cuma antara keluarga makam mbah priok dengan satpol PP, itu cover both side kan. Kalau all side dtambahi lagi, gubernur, pihak kepolisian, pihak TNI, pihak RS, kan cover all side. Ditambahin lagi pihak warga, kan jadi bukan both side lagi kan, media kan berkembang jadi all side.

56. Beritanya kan tentang seminar, biasanya kalau berita tentang seminar itu karena memang tertarik atau memang ada kerja sama tertentu dengan yang ngadain seminar?

Bisa aja, bisa dua-dua nya, itukan orang ngundang. Kalau temanya menarik dan cocok dan bagus buatt kita ya kta ambil kalau ga ya ga perlu.

57. Beritanya tentang etnis tionghoa di *Kompas* dari 2004 ke 2009 kan berkurang?

Ya karena tidak ada soal, tidak ada problem, sudah tidak jadi masalah lagi, yak arena uda ga ada soal lagi dengan SBKRI. Kalau dikaitkan dengan etnisnya, ya anggoro-anggodo ini.

58. Kaya di berita ini kan ngebahas tentang SBKRI juga kan?

Ya waktu itu kan karena bukan hanya ada satu teman, tapi karena ada beberapa teman, kita cek yang ini, ya emang ada persoalan aku juga ditanyain, yang lain juga gitu baru kita angkat kalau Cuma satu orang tidak valid. Artinya hanya kebetulan, kebetulan aja dia accident nya aja dia.

59. Jadi mas mengangkat tentang SBKRI itu karena ada pengalaman dari beberapa teman yang bermasalah dengan SBKRI sehingga mas jadi tertarik untuk menulis tentang SBKRI itu?

Ya iya tapi beberapanya itu ya diliat juga, ada berapa, dimana, disitu aja atau ditempat lain juga.

Ketika mas tertarik menulis tentang SBKRI itu mas kemudian mencari info dan menggali lebih dalam lagi ya iya itu uda standar, kita Tanya lagi, punya temen lagi gak? Yang China siapa lagi yang bermasalah dengan SBKRI, waktu itu memang tidak semuanya yang mengeluhkan itu tapi banyak. Saya cek lagi di Palembang

gmana? di jawa timur gmana? Setelah di cek ada problem juga, di beberapa propinsi ada problem, 3 atau 4 propinsi kan jadi problem nasional kan. Berita politik kan berita nasional kan, karena itu kita ambil, wah berarti ada persoalan dengan ini ya kita ambil. Kalau Cuma wah Cuma 2 aja, disini tidak ada berarti tidak ada masalah. Kalau misal terjadinya cuma disolo berarti berita itu berita lokal bukan berita nasional.

60. Kalau nulis selain dari narasumber juga ngambil referensi dari media2 lain tidak mas?

Sangat jarang ya kecuali kepepet, kepepet dalam arti *Kompas* ga ada laporan dan tidak ada sumber lain yang bisa kita tanya. Misalnya ketika penyerangan pertama amerika di afganistan, ya kta ngutip dari reuters. Kan kita tidak ada wartawannya, atau kita ngutip dari antara langsung. Biasanya kita ngutip dari reuters, antara, kantor berita lainnya, bukan misal *Kompas* mengutip dari media Indonesia, itu tidak pernah. Kecuali kalau masih dalam satu grup ya, misal foto, *Kompas* tidak ada, kita minta ke warta kota, kita kan masih satu grup to.

61. Ketika anda menulis apakah anda juga mempertimbangkan reaksi dari pembaca?

Yaiya pasti, kta kalau nulis satu, menarik ga, buat kita juga buat pembaca, kalau kta sebagai pembaca baca berita kaya seperti ini tertarik ga, sneng ga, atau terganggu ga, makanya itu kan kit abaca lagi, ini terlalu panjang ga kalimatnya, kalau kepanjangan kta potong, atau kasih koma, atau kalau kita maksimal itu 12 kata sampai 16 kata. Ga

boleh lebih dari 16 kata, itu terlalu panjang harus dipecah kalimatnya. Kita sebagai pembaca, pembaca *Kompas* harus berpikir “wah, ga suka kaya seperti ini”, kita harus berpikir itu terus. Atau ada yang seru, dan kita berpikir ini orang lain harus tahu.

62. Ada stereotype orang-orang tiong hoa terutama di dunia politik hanya dimanfaatkan, bagaimana pendapat anda? Jadi mata air bagi birokrasi di Indonesia.

Sekarang ini, siapa yang punya duit jadi sapi perah, kya Sutrisno Bachir dipalakin kan sama orang-orang PAN. Tapi dia mw dipalakin karena ketidak tahuan atau karena dia punya kepentingan politik, misalnya biar aman usahanya. Pemanfaatan tapi bukan karena China nya, tapi karena pataukanya karena mereka punya duit. Kan banyak juga orang-orang China yang miskin, kaya diLampung, apa lagi di Pontianak, apalagi yang kemaren digusur itu, yang di Tangerang itu, China benteng itu. Dan yang gusur orang-orang China juga kan sebenarnya, itu yang gusur si Agung Podomoro, Podomoro China juga, jadi bukan karena Chinanya, karena dia pemilik modal.

63. Ada pandangan etnis tiong hoa tidak tahu tentang dunia politik, bagaimana menurut anda?

Sudah tidak benar lagi kalau sekarang ini, mereka yang sadar politik banyak banget. Gue punya temen sangat sadar politik, Kwik Kian Gie misalnya, atau Robertus Robert itu kan China tulen. Mereka sadar politik.

64. *Kompas* pernah dapet tekanan-tekanan tertentu dari pemerintah tidak? Dalam konteks ini tentang China.

Setahu saya si tidak pernah, kalau dari orang lain contohnya kayak kemaren kasus judi.

Owh, yang judi Raymond itu ya mas?

Bandar judi itu kan China, kalau mikirin persemakamuran antara orang China, pendiri *Kompas* kan China juga, apa mungkin dia nuntut *Kompas* kan tidak. Makanya bukan karena China kan dia nuntut, karena rakusnya kan. *Kompas* dituntut karena *Kompas* menulis bahwa Raymond adalah tersangka dari kasus judi yang dgrebeg oleh Mabes Polri. Tapi *Kompas* ya tenang-tenang aj.

65. Ada perlindungan sendiri ya mas dari *Kompas*?

Ya iya, inikan yang maju pemred nya, redpel. Kita kalau dpanggil ya baru kita lihat sejauh mana panggilannya kan.

66. Sistem pemilihan topic berita itu berdasarkan alasan apakah?

Kalau kita kan angle nya dari sisi manusianya, kalau kta mau ngikutin bahasa yang agak idealis sesuai dengan tag line nya *Kompas* itu, Amanat Hati Nurani Rakyat. Ya jadi angle nya seperti ini, coba kta lihat berita tentang Koja, kita bandingin antara *Kompas*, *Republika* dan *Tempo*, kamu lihat coba kamu baca diantara ketiganya itu mana yang paling soft. Kalau menurutku si *Kompas* yang paling soft, artinya dy tidak membuat orang marah, kita memberitakan fakta bahwa ini korban, ini miris, ini tragedy. Tapi Koran *Tempo* misalnya dengan nunjukin orang bawa pedang narik begitu kan itu kan mengobarkan semangat permusuhan kan, *republika*, coba lihat lagi, media Indonesia coba kamu lihat lagi, lihat aja itu beritanya, bandingin saja. Coba

kamu lihat gambarnya, foto-fotonya. Kita kalau melihat sebuah konflik kita tidak pernah ngomporin, kita misalnya...., meskipun akibatnya bisa dimarahin kan, ini faktanya begini kan? ya betul faktanya begini, tapi kan *Kompas* tidak mungkin memberitakan yang berdarah-darah kaya gitu kan.

67. Kalau kita melihat Tempo beritanya kan boleh dibilang “berani”, jika dibandingkan dengan *Kompas* yang anda bilang soft maksudny *Kompas* “tidak berani”?

Kalau dalam bahasaku Tempo bukan berani itu, tapi provokatif. Kalau dengan gambar orang bwa pedang, menarik pedang itu cukup profokatif, membuat orang marah. Padahal kalau ada konflik kita harus mendinginkan, kita jagan ngomporin kedua pihak, kta cari persoalannya, kita cari penyelesaiannya, solusinya apa. Itu yang harus kita paham betul.

68. Jadi lebih selalu mencoba untuk netral?

Ya bukan netral, kita mengambil posisi untuk mendamaikan.

69. Pernah disuap tidak?

Oh sering, orang menawarkan imbalan, banyak.

70. Terus bagaimana menyikapinya?

Ya kita saja kalau memang beritanya bermutu ya kita muat, kalau ga ya sorry saja. Atau kadang-kadang ada orang maksa-maksa ngasih duit, kita gak enak ya kita terima saja, nanti dari kantor kita balikin, kita kirim balik.

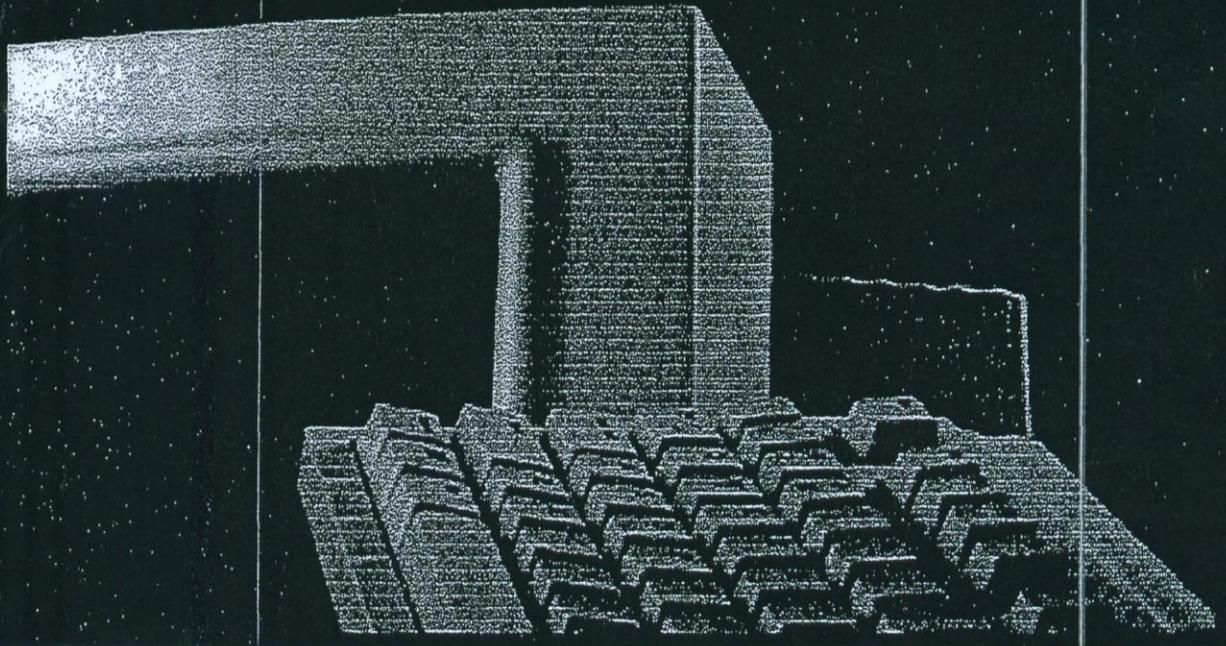
71. Di *Kompas* sejak kapan?

Dari 1997, tapi resmi diangkatnya 1999, awalnya dari wartawan dulu.

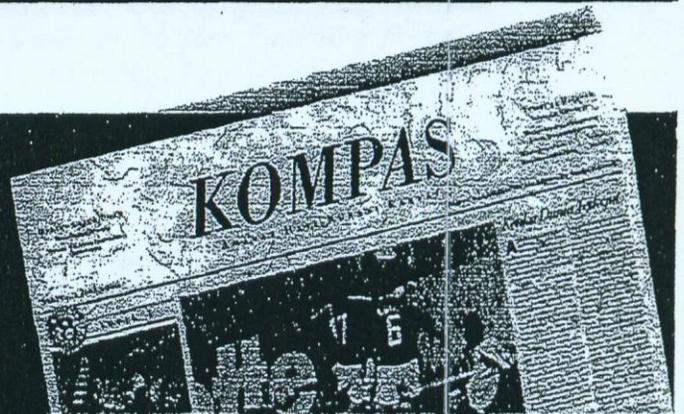


AMANA' HATI NURANI RAKYAT

SEJARAH,
ORGANISASI DAN VISI-MISI



Buka mata dengan



SEJARAH, ORGANISASI DAN VISI-MISI KOMPAS

Tujuan instruksional	: pemahaman sejarah, organisasi dan visi – misi Kompas
Sarana pelajaran	: makalah, film company profil dan powerpoint
Waktu	: 90 menit.

Sejarah / Latar Belakang

1. Lahirnya Intisari

Pada tahun 1960-an Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama sering bertemu dalam gerakan asimilasi. Kedua-duanya punya latar belakang guru, dan punya minat dalam bidang sejarah. PK. Ojong adalah Pemimpin Redaksi *Star Weekly*, sedangkan Jakob Oetama Pemimpin Redaksi majalah *Penabur*. Mereka berbincang-bincang, bahwa pada waktu itu pembaca Indonesia terkucil karena tidak ada majalah luar negeri yang diperkenankan masuk. Keadaan seperti itu tentunya tidak sehat. Muncul ide membuat majalah untuk menerobos isolasi itu.

Intisari adalah awal dari kerjasama PK. Ojong dengan Jakob Oetama. Disebut Sang Pemula karena memang kemudian menjadi awal (pemula) dari Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang awalnya berkembang dari multiple media sebagai *core business*, tetapi kemudian berkembang menjadi *multibusiness group of companies* yang terdiri atas *related diversification* dan *unrelated diversification*.

Untuk memperoleh ijin terbit bagi majalah Intisari. PK. Ojong dan Jakob Oetama pergi ke gedung Kodam (Komando Daerah Militer) di jalan Perwira, Jakarta. Jakob Oetama masih ingat, ia masuk sendirian, sementara PK. Ojong menunggu dalam mobil Opel Caravan-nya yang diparkir jauh-jauh. Jakob mendapat kesan mantan Pemimpin Redaksi *Star Weekly* yang lebih tua 12 tahun itu orang yang cermat dan tidak setengah-setengah. "semua disiapkan dan dilaksanakan dengan teliti".

Majalah Intisari terbit 7 Agustus 1963 dengan 22 artikel, tirus pertama 10.000 eksemplar habis terjual, hitam putih dan telanjang, tidak dibalut kulit muka. Ukurannya kecil, 14 X 17,5 cm dan tebalnya 128 halaman. Drs. Jakob Oetama menjadi pemimpin redaksinya. Nama PK. Ojong dan Adi Subrata tidak tercantum sebagai pengasuh. Mereka menulis seakan-akan penulis luar. Penulis-penulis luar diantaranya Nugroho Notosusanto ("orang Jakarta di London"); Soe Hok Djinn ("Beberapa hari di Ubud"); Soe Hok Gie ("Pengalaman lucu pelukis Nashar"); Kapten dr. Ben Mboi menceritakan pengalamannya diterjunkan dan hidup bergerilya di belantara Irian Barat dalam rangka Trikora, Tan Liang Tie wartawan olah raga sejak *Star Weekly* menulis Zatopek atlet pelari dari Cekoslowakia yang disertai melatih atlet Indonesia menghadapi Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*). Nama-nama lain, diantaranya: Muhamad Ali, Siswadhi, Ajip Rosidi dan Rijono Pratikto.

2. Kondisi Politik Sekitar Tahun 1965

Suhu politik di Indonesia memanas menjelang tahun 1965 ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kegiatan sepihak, bahkan menyuarakan perlunya dibentuk angkatan kelima untuk menghadapi alat-alat keamanan negara yang sah, ABRI. Dengan dalih *landreform* PKI melakukan penyerobotan tanah milik negara. Aksi serupa ini dilukiskan oleh "Harian Rakyat" sebagai adil dan patriotik.

Suatu hari awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani (1922-1965) selaku Menteri/Panglima TNI-AD menelpon rekannya sekabinet, Drs. Frans Seda. Yani melemparkan ide menerbitkan koran melawan pers komunis. Frans Seda menanggapi ide itu, membicarakan dengan Ignatius Josef Kasimo (1900-1986) – sesama rekan di Partai Katolik – dan dengan rekannya yang memimpin majalah Intisari, Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama.

PK. Ojong dan Jakob Oetama kemudian menggarap ide tersebut dan mempersiapkan penerbitan koran. Semula nama yang dipilih "Bentara Rakyat", penggunaan nama itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembela rakyat yang sebenarnya bukanlah PKI. Dalam keperluan dinas Frans Seda sebagai Menteri Perkebunan (1964-1966) menghadap presiden di Istana Merdeka, Soekarno telah mendengar bahwa Seda akan menerbitkan sebuah koran lalu menyarankan nama "Kompas", *pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba..* Maka jadilah nama harian Kompas hingga saat ini, sementara nama Yayasan Bentara Rakyat sebagai penerbit harian Kompas. Para pendiri Yayasan Bentara Rakyat adalah para pemimpin organisasi Katolik seperti : Partai Katolik, Wanita Katolik, PMKRI, dan PK. Ojong. Pengurus yayasan terdiri dari Ketua : I.J. Kasimo, Wakil Ketua: Drs. Frans Seda, Penulis I : F.C. Palaunsuka, Penulis II : Jakob Oetama, dan Bendahara :PK. Ojong.

Walaupun restu dari Presiden Soekarno, berkat dari Mgr. Soegijapranoto, dan bantuan pimpinan Angkatan Darat, proses ijin terbit mengalami kesulitan. PKI dan kakitangannya "menguasai" aparat, khususnya Departemen Penerangan Pusat dan daerah. PKI tidak mentolerir sebuah harian yang akan menjadi saingan berat. Tahap demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi ijin prinsip namun harus dikonfirmasi ke Daerah Militer V Jaya. Persyaratan terakhir untuk dapat terbit, harus ada bukti 3.000 (tiga ribu) orang pelanggan. Frans Seda punya inisiatif mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, anggota-anggota koperasi Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. Dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan tanda tangan terkumpul. Bagian perijinan Puskodam V Jaya menyerah dan mengeluarkan ijin terbit. Pers PKI yang melihat kehadiran "Kompas" bereaksi keras, bahkan mulai menghasut masyarakat dengan mengartikan "Kompas" sebagai "Komando Pastor".

3. Kompas Lahir 28 Juni 1965

Minggu, 27 Juni 1965, sekitar tengah malam jalan Kramat Raya sudah sepi. Pertunjukkan terakhir bioskop Rivoli juga telah berakhir, dan penonton beberapa jam lalu berhamburan pulang. Tinggal beberapa becak yang masih mangkal di malam yang dingin itu. Tidak jauh dari situ kegiatan percetakan PN Eka Grafika (dahulu Percetakan Abadi) baru mulai, beberapa orang berkumpul mengelilingi mesin cetak Duplex. PK. Ojong (alm), Jakob Oetama serta beberapa wartawan Theodorus Purba (alm), Tinon Prabawa (alm), Tan Soe Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Edward Linggar), Roestam Affandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, dan Harthanto (alm). Mereka nampak tidak sabar dan was-was, diantara mereka sebentar-sebentar melihat arlojinya mirip sebuah penantian lahirnya bayi pertama. Wartawatnya, Erka Muchsin (alm) dan Threes Susilastuti menanti penuh harap di rumah.

Di sudut lain, duduk di kursi menghadap meja korektor adalah Kang Hok Djin, Kang Tiau-w Liang, Dimyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat. Ketika koran pertama Kompas muncul dari mesin cetak, tepuk tangan menyambutnya. Diiringi kilatan lampu kilat dari kamera Sudardja (wartawan foto majalah Penabur), suasana

seketika menjadi berubah. Harian Kompas lahir tanggal 28 Juni 1965 dengan motto "Amanat Hati Nurani Rakyat" itu, keesokan harinya mulai dipasarkan. Kompas pertama terbit empat halaman. Kompas edisi pertama memasang sebelas berita luar negeri dan tujuh berita dalam negeri di halaman pertama. Berita utama di halaman satu ketika itu berjudul "KAA Ditunda Empat Bulan". Pojok Kompas di kanan bawah mulai memperkenalkan diri, "Mari ikat hati. Mulai hari ini, Dengan, ... Mang Usil". Di halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama : Pemimpin Redaksi Drs. Jakob Oetama, Staf Redaksi : Drs. J. Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, Eduard Liem.

Sementara istilah Tajuk Rencana ketika itu belum ada, namun halaman II ada lahirnya Kompas, tajuk surat kabar ini. Di halaman II pula terdapat antara lain berita luar negeri dan dua berita dalam negeri. Ditambah tiga artikel, satu diantaranya menyangkut luar negeri. Di halaman ini ada kolom hiburan-Senyum-Simpul. Halaman III ketika itu antara lain berisi tiga artikel, satu diantaranya mengenai luar negeri. Ada pula alasan mengenai penyakit ayan dari Dr. Kompas. Sedangkan halam IV antara lain berita dan artikel luar negeri dua dan satu dalam negeri. Di halaman ini hanya tercatat dua berita olahraga, satu diantaranya mengenai "Persiapan Team PSSI ke Pyongyang". Waktu itu iklan masih kurang dari separuh halaman. Dari enam iklan, satu diantaranya dari redaksi Kompas tentang "Permintaan menjadi langganan Kompas". Iklan paling besar dan bergambar hanya satu, yaitu obat batuk dan cacingan.

Kedua perintis Kompas setiap saat terjun langsung ke bawah. Mereka berusaha agar dari hari ke hari mutu Kompas kian baik. Karena itu, setelah sebulan di cetak di Eka Grafika, harian ini kemudian dicetak di Percetakan Masa Merdeka Jl. Sangaji, Jakarta. Percetakan ini memang lebih baik. Meskipun sistem settingnya masih cetak timbul, namun percetakannya sendiri sudah menggunakan mesin rotasi. Karena itu, daya cetaknya lebih cepat. Dan memang semenjak itulah oplag Kompas naik dari semula 4.800 eksemplar di masa Eka Grafika, melonjak menjadi 8.003 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1967 oplag Kompas 30.650 eksemplar. Tepat setahun kemudian, tanggal 26 Juni 1968 menjadi 44.400. Ini berarti penambahan tiap bulan pukul rata 1.146 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1969 (ketika harian ini membuka sebuah stand di Jakarta Fair) oplagnya meningkat menjadi 63.747 eksemplar. Tepat 26 Juni 1970 batas 80.000 telah dilewati. Tepatnya oplag Kompas telah mencapai 80.412 eksemplar. Dari jumlah itu, kira-kira 31.000 beredar di Jakarta saja. Ini berarti hampir 40%. Selebihnya (60%) tersebar di luar Jakarta, di seluruh Nusantara. Pola ini, menandakan bahwa Kompas menjadi harian nasional dan bukan harian lokal atau koran daerah, sudah ternyata sejak semula dan bertahan terus sampai kini. Setelah tahun 1980-an oplag Kompas mengalami perkembangan pesat, misalnya 600.000 tahun 1986 selama sebulan. Sekarang rata-rata 500.000 eksemplar (Senin-Jumat), sekitar 600.000 di hari Sabtu-Minggu. Oplag terbesar dicapai pada waktu ulang tahun Bung Karno ke 100 tahun dengan oplag 750.000 eksemplar dalam edisi khusus.

4. VISI DAN MISI KOMPAS

Moto "Amanat Hati Nurani Rakyat:" di bawah logo Kompas, menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Kompas ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Ingin

berkembang sebagai "Indonesia mini", karena Kompas sendiri adalah lembaga yang terbuka, kolektif. Ingin ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Rumusan bakunya adalah "*humanisme transcendental*". "**Kata Hati Mata Hati**", pepatah yang kemudian ditemukan, menegaskan semangat empathy dan compassion Kompas.

4.1. Visi Kompas

"Menjadi Institusi Yang Memberikan Pencerahan Bagi Perkembangan Masyarakat Indonesia Yang Demokratis Dan Bermartabat, Serta Menjunjung Tinggi Asas Dan Nilai Kemanusiaan"

Dalam kiprahnya dalam industri pers "Visi Kompas" berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Panca Sila melalui prinsip humanisme transcendental (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur. Secara lebih spesifik bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka
- b. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi.
- c. Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok.
- d. Kompas adalah Koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa.
- e. Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan.

4.2. Misi Kompas

"Mengantisipasi Dan Merespon Dinamika Masyarakat Secara Profesional, Sekaligus Memberi Arah Perubahan (*Trend Setter*) Dengan Menyediakan Dan Menyebarkan Informasi Terpercaya"

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam 5 sasaran operasional:

- a. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri : cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna.
- b. Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan.
- c. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip.
- d. Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan tiras.

- e. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan.

4.3. Nilai-nilai Dasar Kompas

Seluruh kegiatan dan keputusan harus berdasarkan dan mengikuti nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Mengutamakan watak baik
3. Profesionalisme
4. Semangat kerja tim
5. Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja – penerima proses selanjutnya)
6. Tanggung jawab sosial
7. Selanjutnya, kita bertingkah laku mengikuti nilai-nilai tersebut, dengan begitu kita akan memberikan jasa yang memuaskan bagi pelanggan.

Nilai-nilai Dasar Kompas

Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya

Menghargai ide, pendapat dan saran orang lain.

Memberikan *feedback* yang membangun secara obyektif pada saat yang tepat.

Memberi dukungan atau tidak menghalangi orang lain untuk maju mencapai cita-citanya, serta dalam melakukan pekerjaannya dengan sempurna.

Bersikap tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan gender.

Menerima secara wajar adanya perbedaan pangkat, jabatan dan senioritas.

Tidak mencampuri masalah-masalah pribadi orang lain yang menyangkut hak asasinya.

Bersikap adil terhadap mitra kerja.

Peduli terhadap kepentingan orang lain.

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang berdasarkan kemampuannya masing-masing.

Tidak mengganggu suasana dan ketenangan bekerja.

Bersikap obyektif tanpa prasangka kepada prestasi atau hasil karya semua orang.

Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencoba ide baru dan tidak menghakimi apabila terjadi kegagalan.

Mengutamakan watak baik

Selalu mensyukuri rahmat Tuhan.

Bertingkah laku jujur, tidak menerima suap atau komisi, tidak korup, tidak kolusi dan nepotisme

Tidak berpihak dan tidak memihak.
Bertingkah laku yang pantas sesuai dengan perannya (*good profile*)
Tidak tinggi hati, congkak, iri, dengki, sirik, menfitnah dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar.
Saling membantu dan menghormati.
Bertindak disiplin dan rajin.
Bersikap saling terbuka.
Berkomitmen terhadap lembaga dan profesi.
Bersikap solidier atau setia kawan.
Bersikap bijak dan prudent.
Seimbang dalam menggunakan pikiran dan perasaan.
Bertingkah laku yang sesuai dengan etika dan sopan.
Tulus dan ikhlas dalam memaafkan kesalahan/kekeliruan orang lain.
Bertingkah laku sesuai dengan perkataannya.
Bertanggung jawab terhadap segala tindakannya
Berani mengakui kesalahannya sendiri dan menunjukkan kesalahan orang lain.
Tidak membocorkan dan menyebarkan rahasia perusahaan.
Tidak memanipulasi segala tindakan, data, laporan, dll.

Profesionalisme

Memiliki kompetensi, baik dalam hal kepemimpinan atau manajerial maupun teknikal yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Bertanggung jawab pada tugasnya.
Memiliki tingkat intelektualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaannya dan memiliki wawasan luas yang terkait dengan pekerjaannya
Berdedikasi pada profesi.
Melakukan perbaikan kinerja atau diri dan mengembangkan potensinya secara terus menerus.
Etos kerja yang tuntas (tidak berkerja setengah-setengah).
Berpikir dan bertindak kreatif, inovatif, taktis dan memiliki inisiatif.
Bersikap adil, obyektif dan berimbang.
Memiliki integritas.
Dapat membedakan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi.
Menjalankan etika bisnis sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Bekerja secara sistematis sesuai dengan standar pekerjaannya.
Bertindak proaktif dalam mengantisipasi kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Mengutamakan mencari inti permasalahannya dan menyelesaikannya terlebih dahulu, jangan mengutamakan mencari siapa yang bersalah atau menyalahkan orang lain.
Mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (efektif dan efisien).
Mengutamakan pelaksanaan tindakan nyata (*get things done*).
Berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak (*win-win solution*)
Berkomunikasi secara asertif dan responsif (tidak hanya mengutamakan haknya sendiri dengan mengesampingkan hak pihak lain), tidak secara agresif (hanya mengutamakan haknya sendiri) dan submisif (haknya sendiri disalahgunakan pihak lain).

Semangat kerja tim.

Bekerja secara gotong royong.

Menjaga kemistri dan keharmonisan dalam pekerjaan.
Mengutamakan kepentingan yang lebih besar, tidak individualis maupun sektoral.
Peduli dengan persoalan orang lain.
Bekerja sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya masing-masing.
Melibatkan orang lain dalam proses bekerja bersama.
Bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan sinergi.
Bersaing dengan sehat.
Mendukung sportifitas dalam bekerja sama.
Menghindari unsur-unsur favorit terhadap salah satu orang atau bagian.
Tidak hanya mengutamakan hasil kerja, tetapi juga mengutamakan proses dalam bekerja sama.
Mendorong setiap orang untuk mengungkapkan ketidak beresan baik dalam bagiannya maupun dalam lingkaran yang lebih besar lagi.
Bekerja secara institusionalisasi jangan personalisasi.
Menghindari ketergantungan pekerjaan pada individu tertentu.
Mendukung secara konsekuen dan konsisten keputusan yang telah diambil.
Mendorong setiap orang untuk mengungkapkan segala sesuatu secara terbuka dan menghentikan segala isu-isu yang tidak baik.
Menumbuhkan sikap saling mempercayai satu dengan yang lain.

Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja – penerima proses selanjutnya)

Menangani keluhan konsumen secara cepat dan tuntas.
Memberikan pelayanan yang sempurna dari sudut pandang konsumen (*service excellence*).
Memberikan keramahan dalam melayani konsumen.
Melakukan pengamatan dan perbandingan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan oleh pesaing.
Mendengarkan (jangan beramsumsi) dan merespon kebutuhan konsumen.
Menyediakan produk maupun pelayanan sesuai kebutuhan.
Memenuhi kepuasan konsumen adalah tanggung jawab setiap orang di dalam organisasi.

Tanggung jawab sosial.

Peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain.
Menjaga citra perusahaan (tidak bertindak kriminal atau merugikan orang lain)
Mendukung kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
Mendorong setiap orang untuk berperan secara aktif dalam membantu masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

5. Struktur Organisasi *KOMPAS*

PT. Kompas Media Nusantara adalah lembaga media massa, pemimpin tertinggi adalah Pemimpin Umum, Pemimpin Umum dibantu oleh Wakil Pemimpin Umum Bidang Non Bisnis dan Wakil Pemimpin Umum Bidang Bisnis, lalu ada Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab bidang redaksi, dan Pemimpin Perusahaan yang bertanggung jawab bidang bisnis. Dibawah Pemimpin Redaksi ada Redaktur Pelaksana dan dibawahnya terdapat Kepala Desk, Kepala Biro dan paling bawah adalah reporter. Di bidang bisnis, dibawah Pemimpin Perusahaan ada General Manajer Iklan dan General Sirkulasi, dan General Manajer *marketing communication*. Di antara dua bidang itu, ada bagian Penelitian dan Pengembangan, Direktorat SDM-Umum, dan Teknologi Informasi. Mereka sifatnya supporting dan dibawah supervisi Wakil Pemimpin Umum non bisnis, sementara untuk Pemimpin Perusahaan disupervisi Wakil Pemimpin Umum bidang bisnis..

Pembagian dalam Struktur Organisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan pembagian sistem kerja. "Produk" Kompas yang dihasilkan itu merupakan hasil kerja sinergis dari unit-unit yang ada dalam struktur organisasi. Produk Kompas adalah Koran dan berita. Adapun tahap manajemen produk itu adalah sebagai berikut:

5.1. Bidang Redaksi

1). Perencanaan

Dilaksanakan rapat pagi dalam merencanakan berita yang akan dimuat, berdasarkan:

- a. Adanya undangan acara yang diterima Kompas.
- b. Peliputan berita yang ditetapkan di tiap-tiap desk.
- c. Penetapan *event* tertentu, dimana dalam upaya pencarian berita disesuaikan dengan aktualitas peristiwa yang terjadi.

2). Pengorganisasian

Redaktur mengkoordinasikan wartawan-wartawan untuk mencari dan menulis berita sesuai dengan yang direncanakan dalam rapat pagi dan menunjuk wartawarnya untuk mengerjakan tugas-tugas pencarian berita tersebut.

3). Pelaksanaan

Dilaksanakan rapat sore untuk menetapkan berita yang akan dimuat dalam surat kabar (dalam bentuk yang belum jadi) dan membuat *head line* berita. Apabila data belum akurat maka akan ditambah atau dicari lagi. Setelah data berita akurat, berita disunting oleh desk sunting. Setelah disetujui, kemudian akan disunting dalam bentuk lay out Koran untuk dicetak. *Dead line* ditetapkan pukul 23.00. Percetakan dimulai pukul 01.00. Pencetakan sesuai dengan jumlah oplag.

4). Pengevaluasian

Dilakukan evaluasi di tiap-tiap desk/bidang redaktur, selain mengevaluasi berdasarkan masukan dari pembaca yang menelepon atau mengirimkan fax/email. Evaluasi akan

dibahas pula dalam rapat Rabu (rapat mingguan) sebagai dasar perencanaan yang juga akan dibahas dalam rapat pagi. Evaluasi dilihat dari segi:

- Pencetakan susunan huruf dan kata-kata
- Bentuk dan susunan berita pada setiap halaman.
- Isi beritanya

Sumber berita lain selain wartawan dari penulis-penulis dan berbagai kantor berita. Kompas dikenal dengan keunggulan dari segi penulisan opini. Penulis opini Kompas, misalnya : Kwik Kian Gie, Mudji Sutrisno, Arief Budiman, Zuhairi Misrawi, Muhtadin AR, Aloysius Budi Nugroho, Herry Tjahjono dll. Pembagian berita: berita daerah, berita luar negeri, berita dalam negeri, berita olahraga dll.

5.2. Direktorat SDM-Umum

Hubungan kerja dan iklim dalam lingkungan mikro Kompas, yaitu: hubungan antar personal, sehari-harinya terjalin hubungan kekeluargaan, terbuka dan tidak kaku. Dalam hal kerja dan urusan administrasi terjadi hubungan formal, berjenjang untuk menunjukkan fungsi kerja.

Promosi atau kenaikan pangkat karyawan berdasarkan: Penilaian dari sikap dan hasil kerja karyawan tersebut, jika dinilai cukup baik diberikan bahan dan dilatih agar naik jabatannya. Sebelumnya, karyawan tersebut mengalami prajabatan 6 bulan sampai 1 tahun. Jika karyawan itu tidak menunjukkan hasil kerja yang baik, maka tidak jadi naik pangkat. Pengangkatan manajer, jarang dilakukan oleh pihak luar, lebih sering dilakukan pihak dalam. Akhir-akhir ini bidang bisnis mulai mencoba dari luar (*head hunting*).

Peningkatan produktivitas karyawan dilakukan dengan cara: menerima wartawan dengan pendidikan sarjana bidang apa saja, kemudian dididik selama 1 tahun. Adanya orientasi karyawan baru mengenai visi, misi dan sejarah Kompas. Pelatihan Kepribadian, Pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan yang meningkatkan kemampuan (*skill*) dan manajemen. Diadakan rekreasi pada bidang masing-masing, setiap 2 tahun sekali. Pemberian cuti dan tunjangan. Selain gaji pokok, diberikan uang transport, uang makan, bonus, THR. Kenaikan gaji karyawan berdasarkan inflasi ekonomi atau prestasi kerja yang baik, dengan penilaian karya.

Tujuan/sasaran manajemen adalah: memberikan informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, isi pemberitaan bersifat netral dan universal.

Direktorat SDM-Umum dipimpin oleh seorang Direktur, dan dibawahnya ada empat manajer yang memimpin bidang Umum, Penerimaan & Penempatan, Remunerasi (Kesejahteraan), Pendidikan & Pelatihan.

1). Bidang Umum, berkewajiban menyediakan sarana & prasarana untuk setiap karyawan, agar mendapatkan kenyamanan dalam melakukan tugasnya. Ruang kerja yang memadai dan peralatan kerja disediakan oleh perusahaan.

2). Bidang Penerimaan dan Penempatan, unit yang merekrut calon karyawan dan menempatkan di unit sesuai dengan bidang dan keahliannya. Perkembangan dari calon karyawan sampai pensiun menjadi tanggung jawab dari bidang Penerimaan dan Penempatan.

3). Bidang Kesejahteraan (Remunerasi), adalah unit yang mengurus kesejahteraan karyawan misalnya: tunjangan perumahan, cuti, sekolah, dokter, obat, rumah sakit dll.

4) Pendidikan & Pelatihan, unit yang mendidik & mempersiapkan calon karyawan untuk memasuki dunia kerja di bidangnya. Training untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau karyawan menjadi tanggung jawab dari unit ini.

5.3. Bidang Penelitian & Pengembangan

Kepala Penelitian dan Pengembangan yang kedudukannya sejajar dengan Pemimpin Redaksi (Pemred), bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin Umum Harian Kompas. Kepala Litbang membawahi 4 bidang yang mempunyai kedudukan sejajar, yaitu:

1). Pusat Informasi Kompas (PIK)

Pusat Informasi Kompas dipimpin oleh seorang Manajer membawahi tiga bagian:

- a. Bagian Akuisisi : bagian pengadaan dan perawatan bahan pustaka.
- b. Bagian Pengolahan Arsip Elektronik : bagian pengolahan arsip elektronik mencakup kegiatan pengolahan harian Kompas dan informasi dari sumber lain ke dalam bentuk elektronik.
- c. Bagian Layanan Informasi: bagian ini mempunyai kegiatan layanan informasi dan kegiatan sirkulasi.

Pusat Informasi Kompas merupakan satu unit/bidang yang pada dasarnya bertugas mengumpulkan, mengolah dan melakukan temu kembali informasi yang dibutuhkan. Kegiatan Pusat Informasi Kompas bukan hanya sebagai pusat dokumentasi, tetapi merupakan pusat informasi. Fungsi Pusat Informasi Kompas adalah untuk mendukung kinerja redaksi dalam menerbitkan harian Kompas, dan secara rinci mempunyai tugas:

- a. Mengembangkan koleksi baik buku, terbitan berkala dan data terolah.
- b. Mengelola arsip harian Kompas dan beberapa terbitan berkala yang dipilih berdasarkan kebutuhan redaksi ke dalam bentuk arsip elektronik.
- c. Memberikan informasi untuk internal yaitu: wartawan dan karyawan yang tergabung dalam Kelompok Kompas - Gramedia (KKG) dan melayani masyarakat umum.

2). Pusat Penelitian Kompas (Puslitkom)

Pusat penelitian Kompas (Puslitkom) pimpinan seorang Manajer, bertugas menangani penelitian dari hasil kerja redaksi yang hasilnya diserahkan pada bagian redaksi. Penelitian dilakukan dengan bantuan dari mahasiswa dengan mengadakan polling terhadap pelanggan Kompas dan masyarakat umum.

3). Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis)

Pusat Penelitian Bisnis (Puslitbis) dipimpin oleh seorang Manajer Puslitbis, menangani riset pasar / konsumen, memantau pendapat masyarakat terhadap perubahan Kompas, dan mengadakan penelitian terhadap kemungkinan pengembangan Kompas. Forum Pembaca Kompas yang ditangani selama ini untuk memberi masukan / kritik tentang harian Kompas.

4). Bidang Database

Updating database Kompas perlu ditangani setiap kali agar koleksi database harian Kompas selalu *up-to-date*. Bidang Database Kompas dipimpin oleh seorang manajer Database. Biodata tokoh-tokoh politik, pengusaha, artis dan orang-orang terkenal selalu di *update* sehingga datanya tetap relevan menjadi tanggung jawab dari unit ini. Database juga setiap kali memuat profil kabupaten seluruh Indonesia. Buku otonomi daerah dengan isi profil kabupaten telah terbit, dan telah menyusul buku partai Indonesia.

5.4. Bidang Teknologi Informasi

Bidang paling baru dalam organisasi Kompas, ini didirikan tahun 1996 dan direstrukturisasi tahun 2003, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknologi informasi dengan cepat dan tepat, serta bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oleh karena itu, Bidang Teknologi Informasi (TI) diarahkan untuk lebih berorientasi pada memberikan pelayanan yang tuntas (*end-to-end services*) dalam bidangnya, dan tidak hanya berorientasi pada teknologi saja. Untuk mewujudkan hal ini, maka Bidang TI membentuk tim kerja dalam melaksanakan tugasnya. Ada tim yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan jasa layanan dan ada tim yang bertanggung jawab untuk men-deliver layanan tersebut. Kedua tim ini bekerja secara proyek maupun rutin, dan didukung oleh Senior Analyst, Staf Sekretariat, Administrasi dan Gudang. Secara struktur, tim kerja ini dibangun dari tiga bidang keahlian yang dipimpin oleh seorang General Manajer, dan masing-masing bidang keahlian dipimpin oleh seorang Manajer, yaitu Software & Aplikasi, Hardware & Infrastruktur dan Helpdesk & Support.

1). Software dan Aplikasi (SA)

Bidang SA diisi oleh para programmer dan system analis yang bertanggung jawab untuk membangun / mengintegrasikan software, aplikasi dan database menjadi suatu sistem informasi yang diperlukan. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, mudah digunakan, bebas dari kesalahan dan *cost effective*. Untuk itu bidang SA dituntut untuk memiliki metoda kerja yang sistematis dan melaksanakan penelitian yang terarah. Bekerjasama dengan bidang lain, bidang SA memberikan dukungan tingkat lanjut bagi permasalahan software dan aplikasi, serta memastikan bahwa database perusahaan selalu dalam kondisi *up and running*.

2). Hardware dan Infrastruktur (HI)

Bidang HI bertanggung jawab untuk membangun / mengintegrasikan hardware dan infrastruktur untuk menjalankan sistem informasi yang diperlukan. Para ahli hardware dan jaringan komputer serta telekomunikasi di bidang ini juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu, handal dan *cost effective*. Sama dengan Bidang SA, Bidang HI juga memberikan dukungan tingkat lanjut bagi permasalahan hardware dan infrastruktur, serta memastikan bahwa hardware dan infrastruktur komputer & telekomunikasi perusahaan selalu dalam kondisi *up and running*.

3). HelpDesk dan Support (HDS)

Bidang HDS merupakan ujung tombak TI dalam men-deliver layanan TI, serta menangkap kebutuhan dan kesulitan para pengguna sumber daya TI di perusahaan. Oleh karena itu secara proaktif Bidang HDS melaksanakan inventarisasi, instalasi, perawatan, perbaikan dan dukungan teknis, serta memberikan pelatihan agar sumber daya TI perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bidang HDS disebar ke

beberapa lokasi kerja dan masing-masing dikepalai oleh seorang Supervisor. Secara regular mereka menghadiri dan mengadakan pertemuan dengan *user*.

5.4. Bidang Bisnis

Masyarakat Indonesia semakin beragam pola dan gaya hidupnya. Komunikasi massa di Indonesia semakin maju, dan jaringan informasi semakin canggih. Akibatnya, terjadi peningkatan kualitatif kebutuhan informasi. Artinya, sekarang bukan sekadar membutuhkan fakta saja, tetapi petunjuk yang lebih mengarah pada makna dari fakta itu, bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya.

Atas dasar pemikiran itu ada gagasan, dalam usaha penerbitan Kompas mulai dikembangkan pemikiran yang tidak hanya didasarkan pada orientasi produk, tetapi bergerak sampai jarak tertentu ke orientasi pasar. Artinya, dalam membuat produk ditingkatkan kesadaran dan pemikiran terhadap situasi pasar, maupun perkembangan kebutuhan konsumen mengenai informasi.

Fungsi Bisnis :

- Bertanggung jawab dan berkewajiban menjadikan lembaga Kompas menjadi badan usaha komersial yang sehat.
- Mengatur pendapatan dan pembiayaan kegiatan usaha, agar media sebagai produk laku terjual.
- Memantapkan agar unit bisnis dan personilnya sebagai intitusi sosial yang punya nilai ekonomis dan kemasyarakatan.
- Mengedarkan produk agar bisa dikonsumsi pada saat pembaca membutuhkannya.

Sumber:

1. Profil Harian *Kompas*, Database Pusat Informasi Kompas
2. "Kompasiana" oleh P.K. Ojong, Jakarta : Gramedia, 1981
3. Frans Seda, "Sepanjang Jalan kenangan", Kompas, 28 Juni 1990, hal. IV
4. St. Sularto, Kompas: Sahabat dalam Perubahan, HUT Kompas ke -35
5. Orientasi Karyawan Baru, Artikel Sejarah Ringkas Kompas, PSDM Kompas.
6. Hidup Sederhana Berpikir Mulia, P.K. Ojong, Satu dari Dua Pendiri Kompas, oleh Helen Ishwara, Penerbit Buku Kompas, September 2001.

&&&&&&

